

No. 06/98

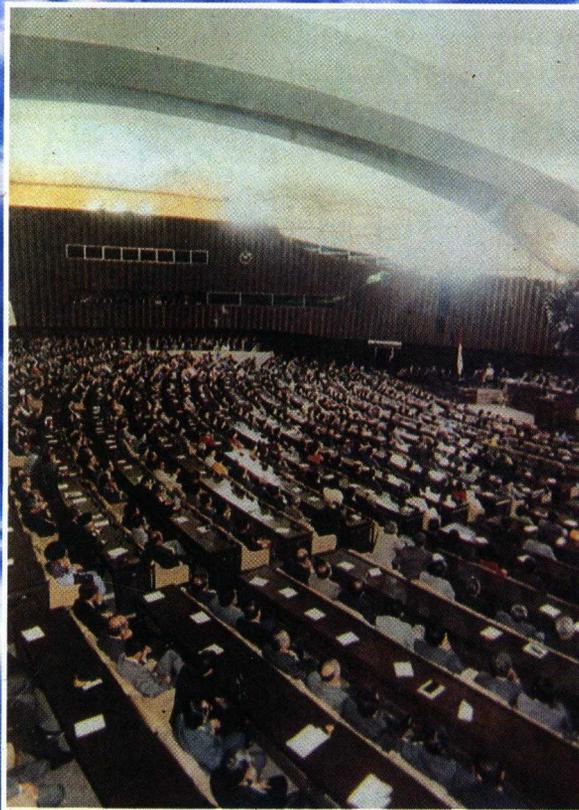
ISSN : 1410 - 3877

Bulletin



h a b a

Informasi Kesenjaraan dan Nilai Tradisional



Budaya Suksesi di Indonesia

Diterbitkan Oleh :
Balai kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

300.5
bul

R.3

135
13-4-98

PENGANTAR

Redaksi

Suksesi merupakan suatu kata mempunyai makna yang dalam bagi suatu bangsa atau negara. Melalui suksesi masyarakat atau bangsa akan mendapat seorang pemimpin bagi bangsa atau masyarakat itu. Di sinilah sebetulnya kelangsungan suatu bangsa atau masyarakat dipertaruhkan. Apabila ia memilih pemimpin yang salah, maka arah kehidupan bangsa dan masyarakat itu akan kacau. Kehidupan rakyatnya jadi menderita. Karenanya, suksesi harus melalui suatu tahapan yang panjang dengan prosedur yang diperhitungkan secara masak dan penuh perhitungan.

Pada bulan Maret 1998 ini, bangsa Indonesia akan melaksanakan ritual lima tahunan. Setelah melaksanakan Pemilu tahun 1997 yang lalu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR (DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II), maka mekanisme pemilihan kepemimpinan nasional lima tahunan mulai akan dilaksanakan pada bulan ini, mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 11 Maret 1998. Selain itu, di Daerah Istimewa Aceh telah pula berlangsung dan akan berlangsung suksesi kepemimpinan, baik pada daerah tingkat I maupun pada daerah tingkat II. Sehubungan dengan itu, diharapkan para wakil rakyat yang duduk di DPR/MPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dapat menyuarakan aspirasi rakyat dan memilih seorang pemimpin yang akan membawa bangsa dan negara ke arah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kali ini, redaksi mencoba menampilkan seluk-beluk dan riak-riak suksesi, baik pada tingkat nasional maupun di daerah Aceh dengan segala dinamikanya. Semoga tulisan-tulisan ini dapat membasuh dahaga pembaca.

Redaksi

Balai Kajian Jarahnitra Banda Aceh Adakan Penelitian Aspek Kesejarahan dan Budaya Aceh

Setiap perubahan ke arah pembangunan akan selalu membawa eksese berbagai aspek, baik sosial maupun budaya. Permasalahan ini tidak hanya dihadapi oleh negara-negara maju saja, tetapi juga dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Industrialisasi sebagai kiblat bagi negara-negara berkembang dapat mendatangkan warna baru dalam kehidupan bagi warga negara tersebut. Perenungan dan pembahasan tentang industrialisasi dan modernisasi sering bertumpu pada isu-isu perubahan sosial, kualitas hidup dan lingkungan, status dan peranan keluarga, percaturan politik lokal, dan berbagai masalah sosial lainnya.

Setelah sukses mengadakan seminar H'iem (teka-teki Aceh) pada medio bulan Oktober 1997 yang lalu dan beberapa penelitian maka kemudian pada akhir tahun anggaran 1997/1998 ini Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh telah mengadakan penelitian tentang aspek kesejarahan dan nilai tradisional di Daerah Istimewa Aceh.

Karena dalam proses industrialisasi dan modernisasi akan terjadi berbagai pergeseran-pergeseran dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan nilai-nilai yang lama belum ada upaya-upaya pendokumentasiannya. Agar nilai-nilai itu tidak hilang tergerus oleh budaya luar, sudah sepantasnya balai ini melakukan pengkajian dan pendokumentasian tersebut.

Menurut Drs. Rusdi Sufi, ada empat judul penelitian yang telah diadakan pada akhir tahun anggaran 1997/1998. Keempat penelitian dan pengkajian yang telah diadakan yaitu **Kewiraswastaan dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Masyarakat di Aceh Besar** dengan Iketua tim Irini Dewi Wanti, SS, **Upacara Tradisional Kenduri yang berkaitan dengan kepercayaan Kekuatan Alam dan Kekuatan Gaib** pada masyarakat Aceh Besar dengan ketua tim Drs. Shabri A dan **Sistem Pengetahuan Kenelayanan Pada Masyarakat Aceh Besar** dengan ketua tim Drs.

Agus Budi Wibowo, MSi serta Keanekaragaman Suku dan Budaya di Aceh. Sedangkan Drs. Rusdi Sufi bertindak sebagai konsultan bagi keempat penelitian yang tersebut.

Program 1998/1999

Menghadapi tahun anggaran yang akan datang Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh juga telah mempersiapkan beberapa penelitian dan perekaman tentang aspek kesejarahan dan nilai tradisional yang mencakup 10 judul penelitian, yang terdiri dari 4 judul penelitian kesejarahan dan 6 judul penelitian nilai tradisional. Keempat judul penelitian aspek kesejarahan tersebut adalah **Minyak dan Gas Bumi dalam Dimensi Sejarah (Suatu Kajian Sejarah Industri, Peta/Profil Keulamaan di Aceh, Perkembangan Olahraga di Aceh, dan Biografi Tokoh-tokoh Adat di Aceh, sedangkan keenam judul penelitian nilai tradisional itu adalah Menyibak Tirai Sejarah dan Budaya Aceh (Sebuah Bibliografi), Penelitian dan Penyusunan Istilah-istilah Budaya Aceh, Adat Perkawinan Etnis Alas di Kabupaten Aceh Tenggara, "Tasapo" dan "Marampot" Pada Etnis Aneuk Jamee (Studi Tentang Kepercayaan terhadap Kekuatan Supranatural yang Berkenaan dengan Penyakit), Pola Pergaulan Antar-Etnis di Daerah Perbatasan, dan Pengkajian Naskah Kuno.**

"Diharapkan penelitian yang telah dan akan dilaksanakan itu dapat membantu pendokumentasian aspek kesejarahan dan budaya Aceh serta dapat dijadikan sumber data dalam pengambilan kebijakan pemerintah" papar Drs. Rusdi Sufi. Selain itu, rencana penelitian dan kegiatan Balai Kajian Jarahnitra Banda Aceh telah dipresentasikan dalam Rakerda Kanwil Depdikbud D.I. Aceh di Balai Penataran Guru (BPG) Aceh, Ujung Batee, Aceh Besar pada tanggal 13-14 Februari 1998 (ABW).

Perkembangan Budaya Suksesi di Indonesia

oleh Agus Budi Wibowo

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kepada kita semua bahwa negara ditugaskan untuk membangun bangsa dan negara dengan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan amanat ini telah dilakukan dengan segala usaha dan daya melalui pembangunan. Selama Orde Lama pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa saat itu. Namun pembangunan saat itu belum menampakkan hasil yang memuaskan.

Selama pemerintah Orde Baru berkuasa, pembangunan telah dilaksanakan pula untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang dilaksanakan saat ini tampak lebih terencana dan berkesinambungan. Kegiatan pembangunan yang selama ini dilaksanakan mulai menampakkan hasilnya.

Keberhasilan pembangunan ini tidak lepas dari situasi politik dan keamanan yang stabil. Situasi politik dan keamanan yang stabil akan memperlancar roda pemerintahan dan pembangunan yang sedang berlangsung karena pemerintah tidak terlalu sibuk menstabilkan kondisi politik dan keamanan serta akan mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Stabilitas keamanan dan politik yang baik tidak terlepas pula dari kondisi sistem suksesi yang ada. Selama Orde Baru telah tercipta suatu sistem yang memungkinkan suksesi yang berlangsung dengan aman yang lancar. Dengan demikian, dapat dikatakan suksesi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pula terhadap pelaksanaan pembangunan. Bagaimana perkembangan budaya suksesi di Indonesia merupakan fokus bahasa dalam tulisan ini. Untuk melihat perkembangan itu, penulis menggunakan pendekatan historis yang membagi perjalanan

sejarah bangsa Indonesia menjadi empat episode yaitu dimulai dari jaman kerajaan, masa penjajahan, masa Orde Lama, dan masa Orde Baru. Dari masing-masing masa itu akan nampak pola suksesi yang berlangsung sesuai dengan jamannya. Masa penjajahan Jepang tidak dibahas dalam tulisan ini karena Jepang berada di Indonesia selama 3½ tahun saja dan belum ada suksesi kepemimpinan yang terjadi pada saat itu.

Suksesi dan Budaya Politik

Pada dasarnya studi kultural melihat budaya sebagai faktor yang berpengaruh terhadap tingkah laku orang atau masyarakat. Namun demikian, bukan berarti analisis ini membutuhkan diri akan adanya kaitan yang tidak terhindarkan antara aspek budaya dengan aspek struktural dari kehidupan masyarakat tersebut. Hal ini karena nilai budaya yang telah mapan terdapat di dalam masyarakat merupakan produk dari sistem yang dibangun dan dibina oleh struktur kekuasaan di dalam masyarakat bersangkutan.¹

Secara statis, unsur budaya politik terdiri dari sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol dan nilai-nilai yang menentukan situasi bagi pelaksanaan tingkah laku politik.² Keyakinan, simbol dan nilai-nilai tersebut membangun makna serta kerangka berpikir bagi seseorang untuk melakukan tindakan politik tertentu. Karenanya, budaya politik akan mempengaruhi pula pelaksanaan suksesi dalam sebuah masyarakat atau kelompok.

Dengan demikian, unsur budaya politik ataupun suksesi di Indonesia adalah keyakinan,

¹Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 1985), hal. 167.

²*Ibid.*

simbol dan nilai-nilai yang berasal dari budaya dan tradisi masing-masing komuniti bangsa Indonesia. Disamping itu, terdapat pula keyakinan, simbol, dan nilai-nilai yang telah hidup di antara keseluruhan komuniti-komuniti tersebut. Kedua unsur budaya itu menjadi unsur penting di dalam perilaku politik atau suksesi orang Indonesia dengan berbagai variasi intensitas dan kombinasinya. Baik budaya dan tradisi lokal maupun budaya dan tradisi nasional dapat bersifat asli dan dapat pula berasal dari bangsa lain.

Sebelum masa Orde Baru, konsep tentang budaya politik atau suksesi yang berlangsung di Indonesia masih diwarnai oleh jiwa dan semangat non-Pancasilais dan non-UUD 1945, seperti feodalisme, demokrasi terpimpin. Setelah berlangsungnya Orde Baru, maka pelaksanaan suksesi diwarnai oleh jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945.

Konsep budaya politik Pancasila merupakan akumulasi dari pengalaman-pengalaman bangsa Indonesia dalam mengarungi sejarah kehidupannya. Ia tidak melalui proses yang singkat, tetapi proses itu berjalan lama dan berangsur-angsur. Melalui berbagai tahapan dan mencapai klimaknya ketika para pendiri negara menetapkannya sebagai ideologi negara yang memberi dan menjadi nafas kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Jadi, budaya politik dan suksesi yang berlangsung di Indonesia diwarnai oleh pandangan historis dan fungsional yang menekankan persatuan dan kesatuan bangsa berada di atas segala-galanya. Hal ini memang tidak lepas hakikat dasar dari ideologi Pancasila itu sendiri, sebagai ideologi pemersatu. Karenanya, sejalan dengan sifat ideologi Pancasila, tentu budaya politik Pancasila bersifat integratif pula. Selalu diusahakan suksesi yang berlangsung dilaksanakan dengan penuh dijiwai dan disemangati oleh Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan hukumnya.

Perkembangan Budaya Suksesi di Indonesia

Masa Kerajaan

Menurut lintasan sejarahnya, di Indonesia telah pernah berdiri beberapa kerajaan besar, baik sebelum jaman sejarah maupun jaman penjajahan Belanda. Beberapa kerajaan besar yang pernah jaya di Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Mataram, Singasari. Dua kerajaan yang disebut pada bagian di muka merupakan kerajaan yang sempat mempersatukan Nusantara. Mereka sempat menjadi besar dan terkenal sampai ke manca negara.

Walaupun mereka sempat menjadi besar, sistem suksesi yang berlangsung tidak menjamin kerajaan itu menjadi besar. Hal ini dikarenakan masih belum tercipta sebuah sistem suksesi yang mendukung terjalannya suksesi yang aman dan lancar. Malahan tidak menutup kemungkinan sistem suksesi yang tidak sesuai ini menyebabkan sebuah kerajaan menjadi runtuh.

Banyak kerajaan menerapkan sistem suksesi yang didasarkan pada faktor keturunan. Putra mahkota adalah putra laki-laki yang paling sulung. Dengan demikian, bagi orang lain (walaupun saudara sekandung) tidak mungkin menjadi seorang raja atau sultan. Terkecuali, putra mahkota itu berhalangan atau meninggal dunia sebelum menjadi sultan atau raja. Contoh dari sistem suksesi seperti ini dapat kita lihat pada suksesi yang terjadi di Kerajaan Mataram.³

Kondisi ini memungkinkan bagi orang-orang yang berambisi ingin menjadi raja untuk melakukan hal-hal di luar prosedur yang telah ditetapkan. Tidak jarang terjadi, orang-orang

³Menurut tradisi istana Mataram, sebagai pengganti raja ditetapkan putra laki-laki tertua atau satu-satunya putra laki-laki dari raja dengan permaisuri (*garwa padmi*). Apabila permaisuri tidak mempunyai putra laki-laki, maka putra laki-laki tertua dari selir (*garwa ampeyan*) dapat diangkat sebagai raja. Apabila keduanya tidak ada, dapat diangkat saudara laki-laki dari raja atau paman atau saudara tua dari ayah raja sebagai pengganti. Lihat Marwati Djoened Poeponegoro dan Nugroho Notosusanto (eds.), *Sejarah Nasional Indonesia IV*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1992), hal. 6

yang demikian, lantas melakukan makar terhadap raja yang sedang memerintah. Peperangan pun berkobar setelah itu. Kalau makar tersebut dilakukan oleh saudara kandung, maka terjadi perang saudara. Dalam sejarah tercatat beberapa perang saudara besar pernah terjadi di pulau Jawa pada beberapa kerajaan besar seperti Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit dan lain-lain⁴.

Lain halnya dengan hal tersebut di atas, ada pula dari kalangan rakyat biasa yang berambisi ingin menjadi kalangan atas, maka ia pun akan melakukan makar/pembunuhan terhadap raja/penguasa yang sedang memerintah. Contoh kasus seperti ini dapat kita lihat pada masa Kerajaan Singasari. Saat itu, ada seorang yang berambisi ingin menjadi penguasa. Dialah, Ken Arok⁵, yang karena ambisinya kemudian membunuh seorang akuwu, Tunggul Ametung. Setelah berhasil, kemudian ia mendirikan Kerajaan Singasari.

Masa Penjajahan

Setelah masa kerajaan berakhir, kemudian masa penjajahan hadir ketika bangsa Barat menancapkan kuku kekuasaannya di bumi Nusantara. Mekanisme suksesi yang sering terjadi di beberapa kerajaan di Indonesia pun mengalami perubahan. Sekalipun praktek suksesi pada masa kerajaan masih dipraktekkan, namun hal itu tidak sepenuhnya dilaksanakan. Dalam hal ini kepentingan pihak penjajah ikut berbicara di dalamnya. Tidak sedikit, pengambilan keputusan dalam suksesi dipengaruhi oleh keinginan sang penjajah. Siapa yang dianggap cocok atau memihak si penjajah, maka dialah yang diangkat sebagai sultan atau raja. Pengangkatan ini tidak tanpa tujuan. Biasanya, pengangkatan sultan atau raja ini disertai dengan sebuah perjanjian yang menguntungkan pihak penjajah.

Oleh karena itu, tidak sedikit pula tradisi ini menimbulkan perpecahan di kalangan bangsawan di kerajaan itu. Suksesi ini sering pula disertai dengan perang saudara di antara mereka. Pada masa Kerajaan Mataram pernah beberapa kali terjadi perang saudara karena akibat suksesi yang diwarnai oleh campur tangan Belanda. Saat itu, biasanya Belanda memainkan politik *de vide et impera* dalam menjalankan suksesi di sebuah kerajaan. Mereka mencari kesempatan dalam kesempatan. Akibatnya, kerajaan itu tidak utuh lagi karena telah dibagi-bagi dan luas wilayahnya menjadi semakin sempit. Hal ini dapat kita lihat pada Kerajaan Mataram yang akhirnya terpecah menjadi empat kerajaan, yaitu Kraton Solo (Paku Buwanan), Mangkunegara, Kraton Yogyakarta (Hamengkubuwanan), dan Paku Alaman.

Masa Orde Lama

Setelah masa proklamasi dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia, maka sistem suksesi telah mengacu kepada sistem undang-undang yang telah ditetapkan. Pertumbuhan nasionalisme setelah tahun 1908 membawa perubahan iklim pemikiran. Konsep suksesi yang ditetapkan pada masa sebelumnya mulai ditinggalkan. Namun kondisi politik yang masih kacau dan adanya aksi Belanda, maka sistem suksesi yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 belum dijalankan sepenuhnya.

Setelah proklamasi kemerdekaan tersebut, maka yang menjadi pimpinan nasional tersebut adalah Soekarno sebagai presiden dan M. Hatta sebagai Wakil Presiden. Sistem pemerintahan yang dijalankan saat itu adalah republik presidentiil. Akan tetapi, ketika ada perubahan undang-undang dasar, maka sistem pemerintahan pun berubah kembali. Ketika itu, presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana menteri.

Sistem pemerintahan parlementer tidak berlangsung lama. Sering kali terjadi, usia

⁴Marwati Djoened Poeponegoro dan T. J. Soho Notosusanto (eds.), *Sejarah Nasional Indonesia II*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hal. 397-406

⁵*Ibid.*, hal. 399.

pemerintahan tidak awet. Dalam beberapa bulan saja perdana menteri beserta kabinet telah berganti lagi. Melihat kondisi yang tidak menguntungkan ini, maka kemudian dikeluarkanlah Dekrit Presiden yang menyatakan kembali UUD 1945. Karenanya, sistem pemerintahan kembali ke sistem presidensial. Namun saat itu, ada hal yang tidak sesuai lagi dengan undang-undang dasar, yaitu presiden diangkat seumur hidup.

Masa Orde Baru

Pemerintah Orde Baru adalah pemerintah yang menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dengan demikian, pemerintah yang dijalankan harus sesuai dengan amanat yang tercantum dalam UUD 1945 dan Pancasila. Selama pemerintah Orde Baru menjalankan masa pemerintahannya telah terjadi beberapa kali Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR/MPR.

Wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR/MPR inilah yang akan memilih pemimpin nasional dalam menjalankan roda pemerintahan. Selama pemerintahan Orde Baru berlangsung, Soeharto telah terpilih sebagai presiden, sedangkan wakil presiden telah beberapa kali berganti, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusuma, Soedharmono, dan Try Sutrisno.

Selama pemerintahan Orde Baru ini telah terbentuk suatu sistem suksesi kepemimpinan nasional. Sistem ini dapat disebut sebagai mekanisme kepemimpinan nasional lima tahunan. Pemilu merupakan awal dari dimulainya mekanisme tersebut. Setelah Pemilu dilaksanakan, maka kemudian ditetapkan wakil-wakil yang duduk di DPR/MPR. Merekalah yang akan menetapkan presiden. Mekanisme penetapan presiden dilakukan melalui usul yang disampaikan fraksi-fraksi yang ada di MPR atau melalui pencalonan yang dilakukan oleh orsospol-orsospol (PPP, Golkar, PDI). Sedangkan wakil presiden dilakukan setelah presiden terpilih telah ditetapkan.

Dari Feodalisme Menuju Demokrasi.

Berbeda dengan kondisi kekuasaan yang ada pada saat ini, pada jaman masih jayanya kerajaan-kerajaan berdiri di Nusantara, paham kekuasaan yang dipakai adalah feodalisme. Raja adalah pemegang kekuasaan tunggal dan kekuasaan yang dipegangnya itu bersifat mutlak. Ia yang menentukan hitam-putihnya kondisi kerajaan. Kalaupun ada dewan pendamping raja hanyalah bersifat simbol. Kekuasaan tetap ada di tangan raja.

Ketika kaum penjajah mulai berdatangan ke Nusantara, kekuasaan raja atau sultan mulai berguguran. Penjajah berada di samping kekuasaan raja, bahkan pada beberapa kerajaan, raja tidak mempunyai kekuasaan. Kasus di Kerajaan Mataram menunjukkan Belanda amat berkuasa. Malahan sampai suksesi kepemimpinan kerajaan diwarnai campur tangan Belanda.

Periode pasca kemerdekaan telah terbersit keinginan untuk menciptakan kondisi demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tampak pada pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 yang mana pimpinan nasional dalam menjalankan pemerintahan harus didampingi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seajar kedudukannya dengan Presiden. DPR ini tidak bertanggung jawab kepada Presiden atau sebaliknya. Demikian pula sebaliknya, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengejawantahan wakil-wakil rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi. Hal senada dengan apa yang diungkapkan oleh Soenarko⁶ sebagai berikut :

"alat kekuasaan yang tertinggi harus dipegang oleh suatu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang organisasinya ditetapkan dengan pemilihan oleh suatu Undang-Undang Pemilihan"

Selanjutnya, Soenarko menandaskan bahwa

"pemilihan adalah satu-satunya jalan untuk menyusun dewan tersebut. dan

⁶R. Soenarko, *Susunan Negara Kita Jilid IV*, (Jakarta : Djambatan, 1954).

prinsipil tidaklah dapat diperkenankan cara-cara menyusun dengan jalan lain, meskipun undang-undang pokok tidak mengikat bagaimana pemilihan itu harus dilaksanakan; apakah dengan cara langsung atau tidak, dengan cara umum atau terbatas, dengan liwat suatu kiescollege atau tidak".

Selaras dengan hal tersebut, maka kemudian dibentuklah DPR. Karena kondisi yang masih belum stabil, saat itu baru dibentuk DPRGR. Selain itu, pada tingkat daerah telah dibentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai upaya pengawasan (kontrol) terhadap pelaksanaan roda pemerintahan di daerah oleh kepala daerah, baik di daerah tingkat I (propinsi) maupun di daerah tingkat II (kabupaten/kotamadya). Karenanya, pada tahun 1957 dan 1958 pernah diadakan pemilihan umum yang khusus untuk mengisi keanggotaan DPRD di Pulau Jawa, Sumatra Selatan dan Pulau Kalimantan sesuai dengan amanat dalam UU No. 22 tahun 1948 dan UU No. 1 tahun 1957.

Di bawah Demokrasi Terpimpin tidak pelak lagi demokrasi yang pernah berjalan secara formal dalam periode sebelumnya semakin memudar. Dalam masa Demokrasi Terpimpin tujuan demokrasi mengalami perubahan. Peran DPR mulai menyusut. Kemudian, presiden yang berkuasa saat itu diangkat sebagai presiden seumur hidup. Demikian pula kedudukan DPRD di daerah tidak berbeda dengan DPR yang sama menyusut pula peran DPRD dalam membela kepentingan daerahnya terhadap pemerintah atas menurut konsepsi demokrasi terpimpin hanya dijalankan atas sepengetahuan kepala daerah (KDH). Dengan demikian, kedudukan kepala daerah (KDH) mengemuka. Hal mana telah menyimpang dari Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 dan UU no. 18 tahun 1965.

Masa Orde Baru telah diusahakan kembali ke era pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pelaksanaan demokrasi diupayakan berjalan sebagaimana mestinya. Pemilu sebagai pesta demokrasi rakyat telah dilaksanakan selama 5 kali. Presiden dipilih oleh MPR melalui sidang



Gbr : Suasana kampanye Pemilu ketiga kontestan. Manifestasi demokrasi rakyat

umum. DPR telah menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol terhadap eksekutif. Walaupun pernah terjadi riak-riak terhadap pelaksanaan demokrasi, namun hal ini masih dalam batas-batas kewajaran.

Memang ada tuntutan agar pelaksanaan demokrasi di Indonesia agar lebih "demokratis", namun karena demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi Pancasila, maka tampaknya demokrasi yang telah dilaksanakan adalah sudah bersifat demokratis.

Penutup

Bertitik tolak dari asumsi bahwa kestabilan politik dan keamanan dipengaruhi oleh sistem suksesi yang dilaksanakan di negara itu, maka dapat diperkirakan sistem suksesi ini merupakan salah satu jantung masalah yang menjadi titik perhatian semua pihak. Masalah ini akan menjadi agenda penting bagi semua negara yang akan melaksanakan suksesi di negaranya.

Bagi negara-negara yang mana sistem suksesi belum mapan memang akan menjadi sebuah permasalahan besar karena tidak sedikit akan menimbulkan korban. Namun bagi negara-negara yang sudah mapan, suksesi tidak akan menjadi masalah.

Dari berbagai peristiwa suksesi yang pernah berlangsung di Indonesia dan di manca negara hendaknya menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia yang akan melaksanakan tongkat estafet kepemimpinan lima tahunan yang mana pada tanggal 1 Maret sampai dengan 11 Maret 1998 ini MPR akan melaksanakan Sidang Umumnya. Harapan kita semua, hendaknya SU MPR kali ini berjalan lancar sehingga tidak akan menimbulkan korban dan akan terpilih pemimpin yang akan membawa rakyat dan bangsa Indonesia kepada kemakmuran dan keadilan dalam negara yang *gemah ripah loh jinawi tata tentram Karya raharja*.



Drs. Agus Budi Wibowo, MSi lahir pada tanggal 11 Agustus 1967 di Jakarta. Setelah menamatkan pendidikan SMTA di SMA Negeri Gombong, Kebumen, Jurusan IPA, 1986, mengikuti pendidikan Antropologi pada Fakultas Sastra, UGM, Yogyakarta dan menyelesaikan pendidikan sarjananya di sana tahun 1992. Kemudian, langsung melanjutkan studi pada Program Pasca Sarjana, Jurusan Ilmu Antar Bidang, UGM dengan mengambil spesialisasi studi Kependudukan. Pada tahun 1994 memperoleh gelar MSi. Semasa kuliah aktif sebagai anggota Tim Peneliti Lapangan Kemant (Keluarga Mahasiswa Antropologi) UGM, baik sebagai peneliti maupun koordinator.

Sejak tahun 1995 pernah bekerja pada perusahaan Riset Pemasaran, Research Bureau Indonesia (RBI) Jakarta sebagai investigator dan Surindo Utama sebagai Team Leader Proyek Penelitian di DI Yogyakarta. Saat ini, bekerja sebagai staf Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. Kegiatan lain selain mengadakan penelitian, aktif menulis artikel di koran, dan editor buku.

Dewan Rakyat dan Anggota yang Mewakili Daerah Aceh

Oleh Rusdi Sufi

Pada tahun 1914 Perang Dunia I meletus yang melibatkan beberapa negara Eropa. Salah satu akibat daripada perang tersebut adalah hubungan antara negara-negara Eropa dengan daerah jajahannya menjadi terganggu, misalnya negeri Belanda yang menjajah Indonesia. Mereka khawatir hubungan antara negeri induk (Belanda) dengan daerah jajahan (Indonesia) terputus. Sementara di Indonesia pada waktu itu gerakan kebangsaan sedang tumbuh dan berkembang. Oleh karenanya, pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa di Indonesia mencoba untuk "mengambil hati" rakyat Indonesia yang telah bangkit kesadaran nasionalnya. Kepada rakyat Indonesia dijanjikan pemberian konsesi untuk turut dalam pemerintahan. Janji ini dikenal dengan nama *November-beloofte* atau janji bulan November. Selain itu, untuk menyalurkan aspirasi rakyat Indonesia Belanda mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama *Volksraad* atau Dewan Rakyat. Didirikan pada 16 Desember 1916 dan mulai aktif bekerja pada bulan Mei 1918.¹

Dewan Rakyat ini beranggotakan 60 orang dan ketuanya orang Belanda. Dari 60 orang anggota ini 30 orang adalah penduduk asli Indonesia (pribumi) dan 30 orang lainnya non-pribumi, di antaranya paling sedikit 25 orang dan paling banyak 27 orang Belanda. Selebihnya atau paling sedikit 3 atau paling banyak 5 orang warga non pribumi lainnya, yaitu yang disebut *Vreemde-Oosterlingen* atau Timur Asing yang terdiri dari orang-orang Cina dan Arab. Ketua Dewan Rakyat diangkat oleh Kerajaan Belanda (Kroon). Dari jumlah 60 orang anggota dewan ini, 38 orang dipilih oleh berbagai daerah pemilihan, sedangkan 22 orang

lainnya diangkat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dewan Rakyat ini bersidang dua kali dalam setahun. Namun bila sepertiga dari jumlah anggota dewan menganggap perlu, maka dapat diadakan sidang luar biasa. Sidang biasa setiap tahun dibuka oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Meskipun kondisi keamanan di daerah Aceh pada saat *Volksraad* dibentuk juga dapat disebut baik, namun untuk memenuhi ketentuan pembentukan Dewan Rakyat yang secara terpaksa telah dipersiapkan itu, pemerintah Hindia Belanda juga mengangkat seorang anggota asal daerah Aceh (Berdasarkan pasal 55 ayat 3 "Indische Staatsregeling" atau I.S.). Anggota dewan yang ditunjuk itu adalah seorang tokoh terkenal bernama Teuku Chik Muhammad Thayeb, *Uleebalang* Kenegerian Peureulak, bahagian Aceh Timur. Ia seorang terpelajar yang sejak bersekolah di Bandung pada tahun 1913 sudah aktif dalam Pergerakan Indonesia dan sudah mengenal serta bergaul rapat dengan tokoh-tokoh kebangsaan di Jawa pada waktu itu seperti Iwa Kusuma Sumantri. Karenanya, Teuku Chik Muhammad Thayeb sebagai putra bangsa Indonesia di Dewan Rakyat menjadi lebih dikenal².

Perlu pula diketahui bahwa pada saat DR. C. Snouck Hurgronje akan bercuti ke negeri Belanda, dalam suratnya mengenai perlu dilanjutkan pengawasan terhadap pemuda-pemudi Indonesia yang sedang belajar di Jawa, selaku penasehat pemerintah Hindia Belanda di bidang kebumiputeraan, ia telah memperingatkan supaya pemerintah Hindia³ Belanda tetap waspada terhadap pemuda Teuku Muhammad

²Mailr. No. 338x/36.

³DR. Snouck Hurgronje, *Ambtelijke Adviezen van Snouck Hurgronje 1899-1936*, Jilid I dihimpun oleh E. Gobe dan C. Adriaanse, hal 44-46

¹S.L. van der Wal, *De Volksraad en de Staatkundige Ontwikkeling Van Nederlands-Indie*, Jilid I, 1964, hal. 1

Thayeb. Karenanya, tidaklah mengherankan jika tindakan dan sikap anggota Dewan Rakyat ini telah sangat menjengkelkan pemerintah Hindia Belanda di lembaga tersebut. Usul-usulnya bernada keras, juga terdengar sinis; dan selalu menentang pemerintah Hindia Belanda. Karena vokalnya ini pemerintah tidak menghabiskan masa jabatannya, yang seharusnya selama 4 tahun seperti yang berlaku bagi setiap anggota Dewan Rakyat yang diangkat. Ia hanya dua tahun saja dibenarkan menjadi anggota Dewan Rakyat (1918-1920).

Setelah Teuku Chik Muhammad Thayeb diberhentikan sebagai anggota Dewan Rakyat, pemerintah tidak langsung mengangkat anggota lain yang mewakili daerah Aceh sebagai penggantinya. Lowongan itu terbuka sampai tujuh tahun lamanya. Baru pada tahun 1927 pemerintah mengangkat lagi seorang anggota asal daerah Aceh. Anggota yang diangkat ini yaitu Teuku Nyak Arif, Panglima Sagi XXVI Mukim, salah satu *sagi* dalam daerah Aceh Besar. Teuku Nyak Arif adalah lulusan OSVIA⁴, seorang tokoh yang cukup populer dan tidak kurang kerasnya (vokal) dari anggota sebelumnya yang mewakili Aceh, sehingga membuat pemerintah Hindia Belanda kewalahan.

Perasaan kebangsaan Indonesia yang semakin meluap-luap menjelang lahirnya Sumpah Pemuda pada bulan Oktober 1928 telah mendorong Teuku Nyak Arif pada tanggal 18 Juni 1928 mengucapkan pidatonya di Dewan Rakyat dengan semangat yang berapi-api. Teuku Nyak Arif berpidato dengan perasaan yang penuh keharuan dan kecintaan tanah air serta mengumandangkan kata-kata dan pengertian Indonesia dengan menekankan bahwa kesatuan nasional merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sedangkan syarat untuk itu, kata Teuku Nyak Arif, telah dimiliki oleh bangsa Indone-

sia. Tegasnya Indonesia sudah harus segera merdeka bebas dari penjajahan Belanda.⁵

Selain memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah Aceh, di Dewan Rakyat Teuku Nyak Arif juga turut memperjuangkan bidang pendidikan nasional yang mencakup usul-usul pemberian kesempatan yang luas kepada rakyat Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Di samping itu juga mengusulkan perbaikan gaji guru-guru serta peningkatan mutu guru di Indonesia dan memberi kecaman-kecaman pedas terhadap politik pemerintah di bidang perekonomian dan perpajakan yang dianggap mencekik penghidupan rakyat yang memang sudah hidup melarat.

Salah satu usaha menuju ke persatuan bangsa Indonesia, Teuku Nyak Arif dalam satu sidang Dewan Rakyat telah menolak kebijaksanaan pemerintah yang hendak menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dan sebaliknya ia mengusulkan supaya bahasa Melayu (bahasa Indonesia) tetap dipergunakan.

Perjuangan Teuku Nyak Arif lainnya selama masa jabatan sebagai anggota Dewan Rakyat yang sangat menonjol ialah turut sertanya ia dalam pembentukan Fraksi Nasional di Dewan Rakyat tersebut, yang dibentuk pada tanggal 27 Januari 1930, bersama-sama dengan Suangkupon, R.P. Suroso, Dwijo Sewoyo, Mukhtar, Datuk Kayo, Sutadi dan Pangeran Ali. Fraksi Nasional antara lain bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka dalam waktu secepat mungkin.

Dalam membela kepentingan-kepentingan rakyat tidak jarang terjadi perdebatan-perdebatan sengit antara Teuku Nyak Arif dengan anggota-anggota bangsa Belanda dalam sidang-sidang Dewan Rakyat. Suatu contoh perlu diutarakan di sini, tentang perdebatannya dengan anggota yang bernama Mr. Fruin, sekretaris *Deli Plantervereeniging* dari organisasi *Politiek Economische Bond* (didirikan bulan Januari 1919) yang kemudian

⁴Mengenai riwayat hidup Teuku Nyak Arif dapat dilihat dalam Mardanas Safwan, *Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arif*. (Jakarta : Proyek Biografi Pahlawan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978)

⁵*Kumpulan pidato anggota-anggota volksraad, Mailr. 338x/36.*

pindah ke *Vaderlandsche Club*. Mr. Fruin membela kepentingan perkebunan Belanda begitu gigih, sementara Teuku Nyak Arif menentanginya. Karena perdebatan ini dan suara-suara vokal yang selalu dilontarkan oleh Teuku Nyak Arif di Dewan Rakyat, sehingga ia digelar dengan sebutan "rencong Aceh", yang siap sedia dan kapan saja menikam lawan-lawannya tanpa kenal ampun.⁶ Dalam aksi *Inlandsche Meerderheid* (kelebihan jumlah anggota pribumi) dalam Dewan Rakyat yang diadakan di daerah Aceh, Teuku Nyak Arif juga tidak tinggal diam, dia tetap memperjuangkannya.

Masa jabatan Teuku Nyak Arif di Dewan Rakyat berlangsung selama 4 tahun penuh, yaitu dari semenjak pengangkatannya pada tahun 1927 sampai tahun 1931. Selanjutnya sebagai pengganti Teuku Nyak Arif untuk mewakili daerah Aceh, pemerintah Hindia Belanda mengangkat seorang keturunan sultan Aceh bernama Tuanku Mahmud, yang menjabat sebagai *hoofd ambtenaar ter be schikking* (pegawai tinggi diperbantukan, mula-mula pada kantor gubernur, kemudian Residen Aceh). Tuanku Mahmud adalah seorang lulusan *Bestuur School* (Sekolah Pemerintahan) di Batavia (Jakarta)

Pada mulanya pemerintah mengusulkan dua orang calon untuk anggota Dewan Rakyat yang berasal dari Aceh, yaitu Tuanku Mahmud dan Teuku Chik Johan Alamsyah, *Uleebalang* Kenegerian Peusangan dalam wilayah Bireun (Aceh Utara). Namun akhirnya pemerintah memilih atau mengangkat Tuanku Mahmud saja. Pengangkatan ini berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda bertanggal 15 Mei No. 1 dan berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juli 1931. Masa jabatan Tuanku Mahmud berakhir pada tahun 1935. Akan tetapi, dengan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda bertanggal 4 Mei 1935 No. IX, ia diangkat kembali untuk masa jabatan selanjutnya selama 4 tahun, yaitu sampai tahun 1939. Bahkan setelah itu diperpanjang lagi sampai menjelang berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia pada bulan Maret 1942.

Berbeda dengan kedua anggota Dewan Rakyat asal daerah Aceh yang telah diangkat

sebelumnya, Tuanku Mahmud tergolong seorang tokoh yang moderat dalam Dewan Rakyat.⁷ Ia pernah menjadi anggota Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputera yang didirikan pada tahun 1929, sebuah perkumpulan yang oleh pihak Belanda sebagai *Links-Midden* (kiri tengah).⁸ Dengan kepribadiannya yang disebut *wellevend en beschaafd* (sopan dan beradab, suka menenggang). Tuanku Mahmud dikatakan telah berhasil menarik perhatian banyak teman-teman seprofesi dalam Dewan Rakyat ataupun masyarakat biasa, baik orang Belanda maupun Indonesia, mengenai caranya memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat di daerah Aceh.

Tidak lama setelah Tuanku Mahmud diangkat sebagai anggota Dewan Rakyat, lahirlah "Petisi Sutardjo", yang menghendaki kemerdekaan bangsa Indonesia. Di Dewan Rakyat terjadi perdebatan-perdebatan sengit sehubungan dengan petisi tersebut. Pada waktu diadakan pemungutan suara, ternyata 26 orang menyokong petisi itu, sedang 20 orang menolaknya. Anggota Tuanku Mahmud tidak turut memberikan suara.¹⁰ Akan tetapi, terlepas dari semua itu, nasib "Petisi Soetardjo" akhirnya menemui kegagalan juga karena ditolak oleh pemerintah pusat di Den Haag, yang menganggap bahwa bangsa Indonesia belum lagi matang untuk diberikan kemerdekaan.

Di dalam sidang-sidang Dewan Rakyat selalu menyampaikan usulnya agar menghapus pemerintah militer dalam wilayah-wilayah di

⁷S.L. van der Wal, *op.cit.*, Jilid II, hal. 178

⁸*Ibid.*, hal. 190. Dalam Dewan Rakyat terdapat kelompok-kelompok yang oleh Belanda disebut *Uiterst-link* (kiri habis), *Links-midden* (kiri tengah), *Midden-rechts* (kanan tengah) dan *rechts* (kanan). Dengan Kelompok kiri habis dimaksudkan kaum nasionalis, sedangkan kelompok kanan, duduk orang-orang (pemerintah) Belanda.

⁹A.J. Piekaar, *Atjeh en de Oorlog met Japan*, 1949, hal. 14-15.

¹⁰S.L. van der Wal, *op.cit.*, hal 239-240.

⁶Lihat Koran, *Bintang Timoer*, tahun 1930

daerah Aceh.¹¹ Dan usul ini akhirnya berbuah, yaitu dalam periode 1938-1940 dari enam buah wilayah yang diperintah oleh militer (tentara), lima buah diperintah oleh pamong (sipil) Belanda.¹² Tuanku Mahmud memahami, bahwa dalam wilayah-wilayah demikian (militer), pasti dilakukan tindakan-tindakan dengan cara kekerasan terhadap rakyat oleh tentara Belanda.

Di bidang pemerintahan adat di Aceh yang dilaksanakan oleh para *uleebalang* berdasarkan *korte verklaring*, Tuanku Mahmud memaklumi, bahwa di kalangan pemuda *uleebalang* telah timbul hasrat untuk hidup dalam alam demokrasi. Ia memahami, bahwa struktur pemerintahan adat semakin lama semakin terasa sudah ketinggalan zaman. Karenanya, Tuanku Mahmud mengusulkan dalam Dewan Rakyat agar pemerintah Hindia Belanda berusaha ke arah itu. Akan tetapi, betapapun besar artinya usul ini, namun pemerintah tetap menganggap bahwa usul seperti itu belum tiba masanya untuk dipertimbangkan.¹³

Ketika mendekati masa berakhirnya peran pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, hari Jumat 10 Mei 1940, negeri Belanda diduduki oleh Jerman (Nazi). Ratu Belanda Wilhelmina beserta keluarganya yang diikuti oleh pemerintah pusat Belanda terpaksa pindah ke London. Ketegangan-ketegangan akibat perang Jepang di Cina yang sudah berlangsung sekian lama, dan terus-menerus adanya rongrongan dari pihak nasionalis anggota-anggota bangsa Indonesia di Dewan Rakyat, menjadikan pemerintah Hindia Belanda semakin terjepit. Jika di atas telah disinggung tentang tidak turut

sertanya Tuanku Mahmud memberi suara kepada "Petisi Sutardjo", maka pada pergolakan politik masa-masa belakangan telah membuat ia melihat lain terhadap nasib dan kepentingan tanah air Indonesia. Hal ini ditandai pada waktu diumumkannya "Atlantic Charter" oleh Presiden Amerika Serikat Roosevelt bersama Perdana Menteri Churchill yang menyatakan, bahwa Perang Dunia II yang sudah dimulai di Eropa sejak tahun 1939 telah usai, maka semua bangsa yang selama ini terjajah akan diberikan kemerdekaan.

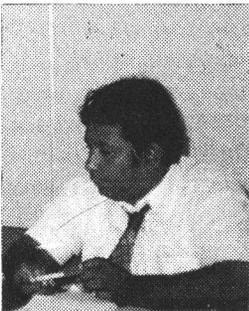
Pada tanggal 23 Agustus 1941, 28 orang anggota Dewan Rakyat, termasuk Tuanku Mahmud, menyampaikan pertanyaan kepada pemerintah Hindia Belanda apakah pemerintah menyetujui maksud "Atlantic Charter". Jika ya, bagaimanakah konsekuensi-konsekuensinya bagi bangsa Indonesia di Hindia Belanda. Jawaban pemerintah oleh penanya diharapkan dapat diperoleh dalam sidang Dewan Rakyat yang sedang berlangsung, karena dianggap hal itu sangat menentukan bagi nasib bangsa Indonesia untuk masa-masa mendatang. Namun ternyata bahwa pemerintah Belanda masih keberatan memberikan jawaban yang kongkrit.

Demikian sekelumit informasi tentang Dewan Rakyat dan kiprah tiga orang anggota asal Aceh.

¹¹Lihat *Handelingen Volksraad*, tahun 1935-1942.

¹²Paul Van't Veer, *De Atjeh Oorlog*, (Amsterdam, 1969), hal. 294.

¹³A.J. Piekaar, *op.cit.*; hal. 9.



Drs. Rusdi Sufi lahir 14 Agustus 1944 di Banda Aceh. Saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. Rusdi Sufi juga merupakan seorang yang produktif menulis. Banyak buku karangan hasil penelitiannya yang telah diterbitkan. Demikian pula tulisan ilmiah tentang kesejarahan dan kebudayaan yang dimuat dalam berbagai media massa dan dipresentasikan dalam seminar-seminar, baik lokal maupun nasional. Selain menjabat Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional juga masih aktif mengajar sebagai dosen (lektor kepala) Universitas Syiah Kuala dan IAIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Pendidikan terakhir dilaluinya pada jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1975). Pada tahun 1977-1979 mengikuti Post Graduate Programme dalam bidang sejarah di Universitas Leiden, Belanda.

Peran Ulama dalam Pemerintahan Kerajaan Aceh

Oleh Sri Wahyuni

Dalam sejarah perkembangan peradaban Islam di tempat-tempat hampir seluruh dunia, ulama seringkali muncul sebagai pemimpin dari gerakan pembaharuan sosial dan politik. Ulama merupakan orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam yang secara tradisional berfungsi sebagai khatib, guru, dan pembimbing komunitas Islam. Di dalam komunitas lokal dominasi otoritas ulama terbatas pada pengurusan mesjid atau madrasah tempat mereka memberikan pelayanan sebagai fungsionaris bidang religi.

Aceh dikenal sebagai sebuah Propinsi yang diberi predikat istimewa dalam bidang agama, adat istiadat, dan pendidikan. Dalam bidang agama paham dan praktek Islam sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, begitu pula dalam pendidikan. Sedangkan dalam adat-istiadat diwarnai oleh agama Islam yang berkembang secara damai. Mengenai keistimewaan Aceh tidak terlepas dari kerjasama yang berlangsung antara pemerintahan kerajaan (raja sebagai elit politik) dengan para ulama (pelaksana agama Islam sebagai elite agama) sehingga pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh merupakan satu-satunya kerajaan di Sumatera yang pernah mencapai kedudukan yang cukup tinggi dalam politik dunia, bidang perdagangan internasional dan bidang keagamaan.¹

Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh, ulama mempunyai peran strategis, kedudukannya sama dengan

pemimpin formal. Peran ulama yang dimaksud diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh ulama berupa keikutsertaan mereka dalam proses suatu kegiatan. Dalam hal ini menyangkut peran ulama dalam pemerintahan masa kerajaan di Aceh. Dengan demikian, perlu dipertanyakan seberapa besar peran ulama dalam pemerintahan Kerajaan Aceh ?

Sistem Pemerintahan Kerajaan Aceh

Tradisi kepemimpinan pada masa yang lalu terwujud dalam suatu struktur mulai dari *gampong* (desa), *mukim* (kumpulan beberapa desa), daerah *uleebalang* (distrik), dan daerah *sagoe* (kumpulan beberapa mukim), sampai kepada *sultan*.

Dalam kepemimpinan tingkat *gampong* dikenal tiga unsur utama yang menjalankan pemerintahan, yakni pertama *keuchik* atau kepala *gampong*. Wewenang jabatan diterima dari *uleebalang* di wilayah yang membawahi *gampong* itu. Jabatan ini bersifat turun temurun dan diresmikan oleh *uleebalang*. Pernah terjadi bahwa *keuchik* diangkat oleh *imeum* yang memimpin mukim. Hal ini mencerminkan besarnya pengaruh *imeum* itu yang telah dilimpahkan wewenang oleh *uleebalangnyanya*.

Keuchik berkewajiban untuk menjaga ketertiban, keamanan dan adat-istiadat dalam desanya, berusaha untuk memakmurkan *gampongnya*, memberi keadilan di dalam perselisihan-perselisihan. Seorang *keuchik* umumnya menguasai sebuah *gampong*, namun ada pula yang memegang dua atau empat *gampong*.

Setiap *keuchik* dibantu oleh seorang *waki* (wakil), dan apabila *keuchik* mengepalai lebih dari satu *gampong*, maka di setiap *gampong* tersebut ada seorang wakilnya.

Unsur kedua dari pemerintahan *gampong* adalah *teungku meunasah* atau *imeum*

¹T. Syamsuddin, "Pasang surut Kebudayaan Aceh" dalam *Bunga Rampai Tentang Aceh*, Ismail Suni (ed.), (Jakarta : Bhatara Karya Aksara, 1980), hal. 124.

meunasah, merupakan pimpinan dalam keagamaan, mulai dari mengajar Al-Quran kepada anak-anak dan menanamkan dasar-dasar ketauhidan, memimpin berbagai upacara keagamaan pada hari-hari besar Islam, hingga membacakan doa-doa dalam kenduri-kenduri. Unsur ketiga adalah *tuha peuet* atau *ureueng tuha* yaitu dewan orang tua yang banyak pengalaman serta paham tentang soal adat dan agama. *Tuha peuet* atau *ureueng tuha* berperan memberi nasehat kepada *keuchik* dan *teungku meunasah*.

Komunitas yang lebih besar berupa gabungan beberapa *gampong* disebut *mukim* dan merupakan kesatuan hukum yang berorientasi keagamaan. *Mukim* dipimpin oleh kepala *mukim*. Gabungan dari mukim-mukim dipimpin oleh *imeum mukim*. Kepala *mukim* menangani persoalan-persoalan berada di bawah kekuasaan *uleebalang*, sedangkan *imeum mukim* memimpin masyarakat dalam hal bersifat otonomi tanpa campur tangan sultan. Dengan demikian, *imeum mukim* dapat mengurus kepentingan perkawinan (nikah dan *pasah*), hak turun temurun atau perebutan milik warisan. Terjadilah federasi (gabungan) dari *mukim-mukim* yang bernama *mukim III*, *mukim IV*, *mukim V*, *mukim IX* dan lain-lain. Kepala dari federasi mukim ini mendapat gelar *uleebalang* dan mendapat mandat serta wilayah dari sultan untuk mengurus semua perkara yang tersebut di atas. *Uleebalang* mengatur sendiri pembagian negerinya (desa otonomi), membuka *seuneubok* (perkebunan), memperluas persawahan, perikanan (nelayan), peternakan dan lainnya yang dapat memakmurkan negerinya. Rakyat mendapat tanah bebas untuk membuat sawah atau kebun dan apabila telah menjadi sawah atau kebun boleh menjadi hak milik dengan membayar biaya Raja Taloe.²

Pada masa pemerintahan sulthanah kedua Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1677) mukim-mukim yang tersebut diatas dijadikan *lhee sagoe* atau tiga *sagi* yaitu *sagi XXII*, *sagi XXV*, dan *sagi XXVI*. Daerah *sagoe* (*sagi*) adalah daerah yang merupakan gabungan

mukim-mukim juga, namun daerah ini lebih luas dari daerah *uleebalang*. *Panglima sagoe* (*panglima sagi*) merupakan kepala *sagoe* dan mempunyai hubungan keturunan dengan sultan. Sebenarnya yang menjalankan pemerintahan harian didalam suatu *sagoe* ialah *uleebalang* yang bersangkutan dan *panglima sagoe* sebagai pengawasnya. Namun, apabila negara berada dalam bahaya, maka *panglima sagoe* menjalankan urusan-urusan sipil dan militer atas nama sultan. Urusan nikah-*pasah* yang dipegang oleh seorang kadhi "Kadhi Malikul Adil" diberi kuasa kepada masing-masing *panglima sagoe*.

Kekuasaan sultan mencakup daerah *uleebalang* dan daerah *panglima sagoe*. *Uleebalang-uleebalang* di dalam wilayah Aceh Besar ada yang di bawah *panglima sagoe* dan ada yang langsung di bawah sultan, sedangkan *uleebalang* di luar Aceh Besar dan takluk jajahannya, langsung di bawah sultan sendiri.

Sultan diangkat oleh rakyat atas mufakat dan persetujuan ulama sebagai ahli hukum dan ahli-ahli adat sebagai pembesar yang cerdik pandai, termasuk di dalamnya *panglima kaum*. Untuk mengurus dan mengatur negeri sultan dibantu oleh tiga golongan yang menjadi pegawai atau pembesar tertinggi dari sultan yang angkat langsung oleh sultan mereka adalah orang-orang ahli dalam hukum (ulama), orang-orang yang cerdik pandai (bijak) yaitu orang-orang yang patut mengurus negara (*wazir*, menteri, dan lain-lain), dan orang-orang yang perkasa untuk mempertahankan negeri, yaitu *uleebalang* atau *panglima perang*, dan lain-lain. Adapun tugas yang diserahkan kepada ulama di dalam negeri Aceh, yaitu menjadi penasihat sultan/pemerintah dalam hal yang bersangkutan dengan agama dan memberikan penerangan kepada rakyat tentang keteguhan iman rakyat dalam negeri terhadap Tuhan dan kebaikan yang bersangkutan dengan agama, menjadi kadhi sultan dalam hal memutuskan perkara-perkara (hukum) dalam negeri, menerima wilayah dari sultan (wakilnya *panglima sagi* atau *uleebalang*) untuk menikahkan orang yang tidak berwali dan mempasah atau *fasiq* perempuan yang boleh dipasah atau *dipasiq* dan lainnya

²H.M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, (Medan : Pustaka Iskandar Muda, 1961), hal. 315.

yang bersangkutan dengan hukum (agama). Mengenai tugas menteri adalah menjadi penasehat dan pembimbing sultan, mempertimbangkan urusan tata negara, menjalankan sesuatu muslihat (diplomatik) dan siasat serta mengamati segala pekerjaan. Menyusun dan menjaga baik segala peraturan negeri yang diatur atau diperintahkan oleh sultan dengan kebijaksanaannya, agar memperoleh kemajuan, keselamatan dalam negeri dan lain-lain yang berhubungan dengan pekerjaan tata negara. Sedangkan tugas *uleebalang*, yaitu *peutimang nanggroe* (menjaga negeri), menjalankan segala perintah-perintah sultan dalam penangkapan orang-orang yang ingkar akan keputusan hukum dan adat (Adat Meukuta Alam), serta mengadakan laskar pertahanan negeri dimana perlu dan lain-lain.³

Ulama dan pemerintahan

Semenjak tahun 1606-1637 kerajaan Aceh dikendalikan oleh Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini di Aceh faham tasawuf telah dikembangkan oleh ulama-ulama yang amat termasyhur di kala itu seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As Samatrani. Faham itu kemudian ditulis dalam bentuk syair sebagai hasil kesusasteraan Aceh masa itu. Syamsuddin As Sumatrani merupakan murid Hamzah Fansuri. Ia adalah penasehat Sultan Iskandar Muda. Tindakan Sultan banyak ditentukan olehnya.

Dalam masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, ulama besar Nuruddin ar Raniri atas nama Seri Sultan telah mengirim kitab-kitab hukum dan sejarah yang dikarang ar Raniri sendiri, Hamzah Fansuri, Abdul Rauf dan lain-lain ke seluruh negeri-negeri di Melaka, Kedah, Sumatera Barat, Gresik, Kudus, Makassar dan Sulawesi, Ternate.⁴ Pengiriman kitab-kitab hukum dan sejarah kepada raja-raja ke seluruh negeri dan pengiriman orang-orang mereka untuk belajar agama ke Kerajaan Aceh serta kunjungan yang dilakukan, dapat dikatakan suatu kerjasama antara Sultan Iskandar Muda dengan Nuruddin ar Raniri dalam melancarkan pengaruh dan perkembangan Islam ke

Nusantara.

Ketika Sultan Iskandar Muda mangkat pada tahun 1636, menantu beliau Sultan Bungsu atau Sultan Mogul, Putra Sultan Pahang, Semenanjung Tanah Melayu diangkat oleh pembesar kerajaan menjadi Sultan Aceh dengan gelar Sultan Iskandar Tsani (1637-1641). Pada masa ini ajaran tasawuf yang dikembangkan oleh Syaikh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As Sumtrani ditentang oleh Syaikh Nuruddin ar Raniri dan pemusnahan kitab-kitab karangan wujudiyah pada tahun 1637 atas perintah Sultan Iskandar Tsani dan fatwa Nuruddin ar Raniri sebagai ulama istana Aceh dilakukan di depan Mesjid Raya Baiturrahman. Ar Raniri menyatakan dalam khutbah-khutbahnya bahwa ajaran tasawuf Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As Sumatrani termasuk ajaran kaum zindiq dan panteis.⁵ Selanjutnya, sultan bekerjasama dengan Syaikh Nuruddin ar Raniri guna memperluas kemajuan kebudayaan Islam dengan membangun perpustakaan Islam dan menyuruh mengarang dan mengeluarkan lebih banyak syair-syair yang bersangkutan dengan kemajuan Islam.

Setelah menduduki tahta selama lima tahun sultan ini mangkat (15 Februari 1641). Setelah masa berkabung tiga hari, para pembesar kerajaan sepakat mengangkat jandanya, Putri Sri Alam Permaisuri, menjadi sultanat.

Menjelang penobatannya, di kalangan pembesar Aceh timbul sedikit pertentangan karena Sultan Iskandar Tsani tidak mempunyai keturunan dan ada yang memperlakukan soal kelayakan perempuan dalam kedudukan sebagai seorang raja. Alasannya, pengangkatan perempuan sebagai raja bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, menurut tafsiran pihak yang kemudian tersebut, jangankan menjadi raja, menjadi imam dan menjadi wali Am pun perempuan tidak diperbolehkan.⁶ Setelah diadakan

⁵Abdul Hadi W.M., *Hamzah Fansuri Risalah Tasawuf dan puisi-pusinya*, (Bandung : Mizan, 1995), hal. 13.

⁶Rusdi Sufi, "Sulthanah Safiatuddin Syah", dalam Ismail Sofyan (eds.), *Wanita Utama Nusantara*, (Jakarta : Jayakarta Agung Offset, 1994), hal. 43

³*Ibid.*, hal. 333.

⁴*Ibid.*, hal. 260.

permusyawaratan dan dengan ikut campurnya seorang ulama terkemuka di Kerajaan Aceh pada waktu itu, yaitu Teungku Abdurrauf dari Singkel yang menyarankan pemisahan antara urusan agama dengan urusan pemerintahan, diangkatlah permaisuri sebagai sulthanah dengan gelar Seri Sultan Tajul Alam Safiatuddin Syah berdaulat Zil Allah, Fil alam ibnat Sultan raja Iskandar Muda Johan Berdaulat.

Pada masa pemerintahan Sri Ratu Safiatuddin, ulama yang banyak membantu pemerintahan sang ratu adalah Syaikh Nuruddin ar Raniri dan Syaikh Abdurrauf berasal dari Singkil di sebelah Selatan Aceh bergelar Teungku Syiah Kuala yang saat ini nama beliau diabadikan menjadi nama Perguruan Tinggi Negeri kebanggaan masyarakat Aceh di Banda Aceh.

Selama masa pemerintahan ini usaha untuk memperbanyak kitab-kitab ilmiah terus digalakkan dan Ratu memerintahkan Syaikh Abdur Rauf pergi ke India (Kayapatanam), Iran (Baghdad), Mekkah dan Madinah guna mempelajari dan memperdalam ilmunya. Selama sembilan belas tahun menimba ilmu di Mekkah, atas permintaan Sri Ratu Safiatuddin, beliau kembali ke Aceh dan diangkat sebagai Kadhi Malikul Adil. Kitab-kitab karangan beliau seperti Tafsir Balawi, Maratul Thalab dan lainnya ditulis dalam bahasa Jawi Pasai guna memperbanyak isi perpustakaan umum dan menjadi kitab tuntunan kadhi-kadhi kerajaan. Kitab ini sangat digemari di seluruh negeri Aceh dan daerah-daerah kerajaan Aceh.

Pada masa Sulthanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1677) menjadi sulthanah menggantikan Ratu Safiatuddin yang mangkat tahun 1675. Mufti kerajaan tetap dipegang oleh Syaikh Abdur Rauf. Peran Syaikh Abdur Rauf yang menjadi sumbangan penting pada masa itu adalah nasehat supaya ratu mengadakan perubahan dalam sistem pemerintahan di Kerajaan Aceh, sebagaimana yang tercantum dalam Adat Meukuta Alam. Sulthanah mematuhi nasehat itu, dengan melakukan perubahan dalam struktur pemerintahan. Daerah asal kerajaan Aceh, yang

dikenal dengan nama Aceh Rayeuk (Aceh Besar) atau Aceh Inti di jadikan tiga federasi yang disebut *Lhee Sagoe* (tiga sagi).⁷

Setelah Sulthanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah mangkat, digantikan oleh puteri Raja Setia binti Sulthan Muhammad syah yang bergelar Paduka seri Sulthanah Inayat Syah Zakiatuddin Syah Berdaulat Zil Allah Fil Alam (1677-1688) dengan penasehatnya Syaikh Abdur Rauf.⁸

Sepeninggal Ratu Zakiatuddin Syah, naik tahtalah Kamalat Zainatuddin Syah (1688-1699). Pada saat Ratu Kamalat akan naik tahta pertentangan antara pembesar kerajaan. Pihak pertama orang kaya dari sekelompok bangsawan tertentu yang tidak menyetujui pengangkatannya karena mereka menginginkan kekuasaan Kerajaan Aceh kembali dipegang oleh kaum pria. Pihak kedua tidak keberatan terhadap hal itu. Mereka yang termasuk dalam orang kaya 12 yang memihak kepada golongan ulama merupakan penentang utama pengangkatan wanita sebagai raja. Hanya golongan Panglima Tiga *Sagi* yang terus mempertahankan dan membela hal itu.

Dalam pertentangan pertama golongan Panglima Tiga *Sagi* tetap mampu mempertahankan pendiriannya sehingga Ratu Kamalat Syah tetap menduduki tahta. Dalam pertentangan selanjutnya golongan ulama menjadi pemenang dengan taktik solusi konflik yang ditawarkan. Golongan ulama mengusulkan agar persoalan keputusan mengenai legalitas kedudukan wanita sebagai raja sebaiknya diserahkan kepada raja dan ulama di Mekkah. Mengenai taktik ini Veth (1873)⁹ mengemukakan "akan tetapi golongan alim ulama tidaklah tinggal diam mereka memperkuat posisinya dengan sepucuk surat

⁷Rusdi Sufi dan Muhammad Gade Ismail, "Ratu Nurul Alam, Inayat Syah dan Kamalat Syah", dalam Ismail Sofyan (eds.) *Wanita Utama Nusantara*, (Jakarta : Jayakarta Agung Offset, 1994), hal. 68.

⁸*Ibid.*, hal. 68

⁹*Ibid.*, hal. 73.

Penutup

Dari penjabaran sebelumnya, dapat ditarik suatu benang merah antara pemerintah - sebagai elite politik dengan ulama - sebagai elite agama - mempunyai keterkaitan yang erat. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan budaya masyarakat, latar belakang sejarah, dan sistem yang berlaku. Dalam hal ini, budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama Islam. Dengan demikian "duet" antara pemerintah dan ulama dalam pemerintahan Kerajaan Aceh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak rakyat.

Contoh lain sebagai suatu acuan saat ini - bahwa pemerintahan dipengaruhi oleh lingkungan budaya masyarakat, latar belakang sejarah dan sistem yang berlaku dapat dilihat pada pemerintahan Vatikan di Roma, yang mana pemerintahan tertinggi dipegang oleh Paus, ia memegang kuasa mutlak dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di samping itu, Paus juga berperan sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai agama yang mereka anut.

¹⁰Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, (Jakarta : Cita Panca Serangkai, 1993).

dari seorang Kadhi Malikul Adil di Mekkah, yang memuat pemberitahuan kepada kepala-kepala dan rakyat Aceh bahwa penempatan seorang wanita pada kekuasaan tertinggi bertentangan dengan syariat Islam. Strategi ini berhasil. Orang-orang kaya tidak berani lebih lama lagi menentang keberanian rakyat. Kamalat Syah diturunkan dari tahta dan pemerintahan diserahkan kepada Badrullah Syarif Hasyim Jamaluddin. Sesudahnya, kendali pemerintahan tidak pernah lagi berada dalam tangan seorang wanita".

Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Mahmud Syah meletus perang Aceh melawan Belanda (1873). Sultan beserta uleebalang, ulama dan seluruh rakyat bahu membahu mengusir. Salah satu ulama yang terkenal dan berperan membangkitkan semangat rakyat melawan penjajahan Belanda adalah Teungku Chik Di Tiro dengan merubah "Perang Aceh" menjadi "Perang Sabil". Teungku Chik Di Tiro meninggal pada masa pemerintahan Tuanku Muhammad Daud.¹⁰ Pada tahun 1903, penyerahan Tuanku Muhammad Daud raja Aceh yang terakhir, secara resmi mengakhiri perang terhadap Belanda. Namun perjuangan para ulama Aceh dan perannya dalam pemerintahan dewasa ini masih dibutuhkan.



Sri Wahyuni, S.Sos lahir pada tanggal 1 Maret 1974 di Kutatuha Blang Pidie, Aceh Selatan. Setelah menamatkan pendidikan SMTA di SMA Negeri 3 Banda Aceh tahun 1992, kemudian melanjutkan studi pada program studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Ujung Pandang dan lulus tahun 1996. Semasa kuliah aktif sebagai pengurus Ikatan Kekerabatan Antropologi (IKA-FISIP UNHAS). Saat ini magang di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.

Suksesi pada Pemerintahan Tradisional (Sebuah Studi Pemilihan Keuchik di Aceh)

oleh Sri Waryanti

Kata suksesi¹ seringkali menjadi sebuah kata yang amat berarti bagi setiap anggota masyarakat dan ditunggu kedatangannya. Bagi seseorang yang menginginkan sebuah jabatan, maka suksesi merupakan salah satu jalan untuk meluluskan keinginannya. Suksesi merupakan sebuah promosi baginya. Namun bagi pejabat yang akan disuksesikan, suksesi dapat menjadi momok baginya. Mereka akan kehilangan fasilitas yang biasa mereka dapatkan sebelumnya. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang mengalami *post power syndrom* setelah terkena suksesi.

Dalam proses suksesi ini seringkali pula terjadi dapat berjalan dengan mulus dan lancar, tanpa kekacauan atau pertumpahan darah. Namun proses ini tidak sedikit pula yang didahului dengan proses keributan atau pertumpahan darah. Misalnya, perebutan kekuasaan di beberapa negara di benua Afrika, Thailand, Philipina dan banyak negara lainnya. Di negara-negara tersebut suksesi seringkali didahului oleh kekacauan atau pertumpahan darah.

Suksesi yang didahului oleh pertumpahan darah memang membuat banyak rakyat menjadi menderita. Seringkali terjadi kudeta akan menimbulkan dendam yang berkepanjangan bagi para elit politik atau anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Di Indonesia, menurut lintasan sejarahnya, pada masa kejayaan beberapa kerajaan besar seperti Mataram, Majapahit, Sriwijaya, Singasari sering pula terjadi suksesi

yang disertai dengan pertumpahan darah. Misalnya, walaupun Raja Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua kerajaan yang sama besar sebelum ia turun tahta agar tidak terjadi pertumpahan darah, namun usaha inipun sia-sia belaka. Kedua kerajaan (Panjalu dan Kediri) hasil pembagian tersebut akhirnya juga saling bertempur untuk memperebutkan wilayah masing-masing.

Pada tingkat paling bawah, suksesi tidak begitu mengalami kekacauan yang berarti. Pemilihan kepala desa sebagai kepala pemerintahan tingkat paling bawah berlangsung lancar-lancar saja. Di Yogyakarta pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono IX, pemilihan lurah (kepala desa) berlangsung amat demokratis. Kepala desa ditetapkan atas dasar pilihan rakyat melalui pemungutan suara. Setiap warga desa memilih pemimpinnya itu dengan datang ke bilik-bilik tempat pemungutan suara. Kala itu pemilihan lancar-lancar saja, tanpa menimbulkan keonaran. Namun beberapa tahun belakangan ini pemilihan kepala desa di beberapa daerah di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan beberapa tempat lainnya di Indonesia telah diwarnai dengan keonaran sebagai akibat rasa tidak puas karena calon yang didukungnya tidak lulus test, tidak terpilih atau kecurangan-kecurangan.

Aceh sebagai bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tentunya juga mempunyai mekanisme dan kriteria dalam menjalankan suksesi untuk para pemimpin masyarakatnya. Bagaimana suksesi berlangsung di Aceh (khususnya di tingkat desa) merupakan bahasan dalam tulisan ini.

Sistem Pemerintahan.

Walaupun kekuasaan raja-raja telah

¹Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 865), suksesi berarti penggantian (terutama di lingkungan pimpinan tertinggi negara); regenerasi atau proses penggantian kepemimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

pemerintahan *gampong* dapat berjalan lancar. Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan kepada hukum dan adat-istiadat. Adat dan adat-istiadat di Aceh telah memberikan dengan jelas hak dan kewajiban kepada setiap orang, baik seorang pemimpin maupun anggota masyarakat, menurut kedudukan masing-masing. Dalam masyarakat Aceh dikenal adanya pembagian tugas (*separation of job*) yang jelas di antara warga masyarakat menurut kedudukan masing-masing. Dengan demikian, apabila satu komponen tidak benar, maka akan diperingatkan oleh yang lain.

Sistem pemerintahan yang demikian (sistem pemerintahan tradisional) merupakan suatu kekuasaan yang mengaitkan berbagai unsur di masyarakat yang secara bersama membentuk sistem yang menjamin keteraturan, keamanan, dan keharmonisan masyarakatnya. Dalam sistem tersebut tidak terlepas dengan unsur-unsur kepemimpinan yang merupakan suatu proses interaksi antara pemimpin dengan anggota-anggota lain dalam kelompoknya. Dalam proses interaksi itu akan selalu diikuti dengan berbagai tindakan yang sesuai dengan norma dan nilai pada masyarakat tersebut.⁴

Pemilihan *Keuchik*

Seseorang yang akan menduduki sebuah jabatan (pimpinan) harus memenuhi persyaratan tertentu. Demikian pula dengan jabatan pemimpin sebuah *gampong*. *Keuchik* sebagai pimpinan sebuah *gampong* dipilih atas dasar persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh adat. Sesuai dengan kehidupan masyarakat Aceh yang penuh diwarnai nuansa Islami, maka seorang *keuchik* juga harus mengetahui tentang hukum agama Islam yang selalu digunakan oleh masyarakat, selain kemampuan memimpin dan kearifannya.

Lebih daripada itu, seorang *keuchik* juga harus mengetahui dengan baik hubungan kekerabatan antara penduduk dalam *gampong* yang dipimpinya. Dia harus mengetahui orang-

orang yang disegani di *gampongnya*, siapa-siapa di antara penduduk yang mempunyai pengaruh dan kelebihan dari penduduk lain. Di samping itu pula, seorang *keuchik* harus mengetahui sekedarnya tentang sejarah penduduk (asal-usul), luas *gampong* dan luas tanah yang dimiliki oleh masing-masing penduduk dan yang paling penting adalah seorang *keuchik* harus menguasai benar adat-istiadat⁵ dan hukum adat⁶ yang berlaku dalam masyarakat *gampong* itu.

Persyaratan-persyaratan yang tercantum di atas harus dipenuhi oleh seorang calon *keuchik*, utamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan perselisihan di antara penduduk dalam *gampongnya*. Dengan demikian, untuk menjadi *keuchik* tidaklah semudah untuk menjadi seorang kepala desa karena selain persyaratan umum seperti di atas, ada pula persyaratan khusus. Persyaratan-persyaratan khusus itu adalah orang laki-laki yang telah kawin atau pernah kawin dan telah bercucu, harus penduduk asli atau orang yang telah menetap di *gampong* itu sekurang-kurangnya dua generasi, berasal dari keluarga berada dan terhormat, berkelakuan baik dan tidak pernah tercela, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk memimpin (kemampuan di sini bukan saja fisik dan mental, tetapi juga kekayaan) dan bersedia dengan tanpa imbalan untuk memimpin masyarakat *gampong*.⁷

Dengan persyaratan khusus ini dapat dikatakan bahwa jabatan *keuchik* merupakan

⁵Adat adalah kebiasaan baik bagi kebiasaan yang dianggap baik maupun buruk. Adat-istiadat adalah kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai, tetapi ditaati.

⁶Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat, yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

⁷Eddy Nur Ilyas *op.cit.*, hal. 31-34.

⁴Sumarsono, et al., *Sistem Pemerintahan Tradisional Riau*. (Jakarta : Depdikbud, Proyek P2NB, 1997), hal. 45.

jabatan yang mulia. Bagi masyarakat yang memandangnya, seorang *keuchik* adalah orang yang mulia. Orang yang memajukan masyarakat tanpa berharap banyak terhadap kekayaan atau imbalan.

Nilai-nilai Adat Dalam

Kepe mimpinan

Sistem pemerintahan *gampong* di Aceh pada umumnya memang tidak akan lepas dari nilai-nilai adat yang tumbuh dan berkembang di daerah tersebut. Peran *keuchik* dalam mengatur keharmonisan masyarakat tidak akan lepas dari wawasan dan pemahamannya pada adat yang berlaku.

Kedudukan seorang pemimpin dan kemajuan suatu *gampong* diatur berdasarkan nilai yang terkandung suatu ungkapan/*hadih maja* Aceh yang cukup terkenal,

Ureung Peurintah yang ato buet
Ureung Tuha Peut yang Peu Putoh Haba
Ureung Kaya yang Pinto Teuhah
Ureung Cedah yang Peugah Haba
Ureung Malem yang Peleumah Peu-
ngeuh
Ureung Ceubeh yang Teung Bela
Ureung Carong Teupat Teumanyong
Ureung Inong yang Peulara Rumoh
tangga
Ureung Gasien yang Tameuyue
Ureung Bateu yang tan na guana

(Pemimpin adalah orang yang mengatur dan memberi perintah, lembaga musyawarah yang memutuskan semua sengketa dan setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Orang kaya yang pintu rumahnya selalu terbuka bagi setiap orang yang membutuhkan bantuan keuangan. Orang arif bijaksana/pandai yang menetralisir setiap ada ketegangan-ketegangan dalam masyarakat. Orang alim yang berkewajiban mengajar ilmu pengetahuan kepada penduduk, orang-orang berani dan kuat yang berkewajiban membela desa dan negara. Orang intelektual tempat bertanya. Wanita yang memelihara, menjaga serta bertanggung jawab terhadap rumah tangga. Orang miskin adalah orang yang disuruh-suruh atau kaum buruh, Orang yang suka melanggar hukum atau orang jahat yang tidak berguna.

Adapun tata aturan kehidupan masyarakat telah

diatur pula melalui adat. Hal ini tercermin dalam *hadih maja* Aceh yang berbunyi,

Adat Bhak Po Teumeureuhom
Hukom Bhak Syiah Kuala
Kanun Bhak Putro Phang
Reusam Bhak Laksamana

(Tata Kehidupan (pemerintahan) bersumber pada Sultan. Tata hukum berkaitan dengan agama menjadi hak tugas para alim ulama dan cerdik pandai. Sopan santun etika dalam pergaulan bersumber pada Puto Phang. Tata kehidupan kemasyarakatan merupakan wewenang dari para panglima).

Dari *hadih maja* Aceh tersebut, tampak bahwa kemajuan masyarakat terkandung dalam diri pemimpin. Pemimpin inilah yang mengendalikan dan mengarahkan masyarakat dalam pembangunan dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Namun demikian, pemimpin ini tidak bersifat mutlak atau absolut dalam pengambilan keputusan. Masih ada pihak-pihak lain yang diikutkan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kekuasaan seorang pemimpin di Aceh adalah kekuasaan yang tidak tak terbatas.

Dalam pengambilan keputusan seorang *keuchik* biasanya akan mengundang segala lapisan masyarakat dalam suatu musyawarah yang diadakan di meunasah, yang hari-harinya dipilih sekiranya setiap anggota masyarakat dapat menghadirinya. Pendapat-pendapat anggota masyarakat dari segala golongan diminta pendapatnya dalam musyawarah tersebut.

Adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan segala permasalahan yang ada mengandung makna bahwa masyarakat dilatih untuk mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memberi suasana demokratis. Dengan latar belakang demikian, nilai-nilai demokratis yang ada di *gampong-gampong* di Daerah Istimewa Aceh dapat hidup dan berkembang. Masyarakat menjadi tidak merasa sungkan dalam mengemukakan pendapatnya. Dengan demikian, akan terbentuk suatu nilai

budaya yang menghargai seseorang untuk mengeluarkan pendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan *gampong*.

Selain seorang *keuchik* tidak mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ia juga harus dapat membina keharmonisan dengan tokoh-tokoh informal lainnya. Karena seringkali tokoh-tokoh informal ini amat dihargai dan menjadi panutan masyarakatnya.

Dalam pelaksanaan adat di Aceh tidak dapat lepas dari keberadaan agama Islam di daerah ini. Hubungan adat dengan agama Islam tampaknya berasimilasi sedemikian rupa sehingga agama Islam merembes dan menjiwai tradisi mereka. Hal ini tercermin dalam *hadih maja* yang berbunyi

Hukom ngon Adat

Lagee zat ngon sipheut

(Hukum dan adat seperti zat dengan sifat-sifatnya)

Begitu besarnya pengaruh agama Islam di daerah Aceh ini menyebabkan fungsi AlQur'an tidak hanya sebagai pengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia, tetapi juga mempengaruhi sistem nilai dalam mengendalikan tingkah laku manusia.

Berdasarkan kenyataan akan kentalnya agama Islam dalam mempengaruhi adat, maka tidaklah mengherankan seseorang yang menduduki jabatan di sebuah *gampong* disamping mempunyai sifat seorang pemimpin masih juga harus mempunyai kemampuan dalam memahami adat yang berlaku dan berbagai ajaran agama Islam yang berkaitan erat dengan adat. Kondisi ini amat berbeda apabila seseorang menginginkan jabatan sebagai kepala

desa.

Dengan adanya berbagai nilai-nilai adat yang sudah baku tersebut, seorang pimpinan diharapkan akan dapat menjadi panutan bagi masyarakatnya.

Penutup

Suksesi merupakan salah satu proses dalam penggantian seorang pemimpin. Akan tetapi tidak setiap suksesi berlangsung dengan damai. Ada pula suksesi yang berlangsung dengan penuh gejolak. Oleh karena itu harus dibuat sebuah sistem yang menjadikan suksesi berlangsung dengan aman.

Di Aceh, seorang pemimpin tidak hanya mempunyai kemampuan memimpin satu kelompok masyarakat. Namun ia juga harus mempunyai kemampuan dalam memahami dan mengerti akan hukum adat, adat dan ajaran agama Islam. Dengan demikian, pemilihan seorang pemimpin harus didasarkan kriteria tersebut. Jadi, tidak mudah menjadi seorang pemimpin di Aceh, sekalipun hanya sebagai *keuchik*.

Dengan adanya kriteria itu, maka seorang pemimpin di Aceh akan menjalankan segala amanah yang dibebankan kepadanya dengan baik. Rakyat akan percaya dengan tindakan yang dijalankan seorang pemimpin di dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin pun akan melaksanakan kaidah-kaidah atau norma-norma yang telah ditetapkan. Kondisi ini akan memberi sinergi dalam pelaksanaan roda pemerintahan di *gampong*. Suksesi pun akan berlangsung dengan lancar, tanpa gejolak, karena masyarakat dan calon pemimpin berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada.



Dra. Sri Waryanti lahir pada tanggal 23 Oktober 1968 di Bantul, Yogyakarta. Setelah menamatkan pendidikan di SMTA di SMA Santa Maria Yogyakarta tahun 1987, kemudian melanjutkan studi pada Fakultas Sastra program studi sejarah dan lulus pada tahun 1992. Selama kuliah aktif berorganisasi di Senat Mahasiswa. Setelah lulus sarjana, kemudian bekerja di PANIN Bank Jakarta. Pernah pula menjadi Sekretaris pada BPD HIPMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 1993 sampai dengan 1997 sebagai pengelola LPK Studi Bina Artha Yogyakarta.

Sejak 1997 bekerja sebagai Staf Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. Selain penelitian, ia juga cukup aktif menulis artikel di surat kabar.

Tuntutan Budaya Kerja Aparatur Negara Menyongsong Era Globalisasi

Oleh *Shabri A.*

Keberadaan aparatur negara dalam suatu pemerintahan negara adalah sangat penting dan menentukan sekali peranannya dalam rangka pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan serta usaha menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di sisi lain, pembangunan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui proses perencanaan yang matang, terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang disertai pula dengan sistem pengawasan yang objektif dan konstruktif.

Keberhasilan pembangunan itu sendiri amat tergantung dari kesempurnaan proses kerja dari aparatur negara, yang notabene pegawai negeri,¹ yang mana aparatur negara ini mengemban tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945, negara serta pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya, yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Untuk mewujudkan aparatur negara yang ideal tersebut, maka perlu dipertanyakan bagaimana upaya membudayakan norma-norma tersebut di atas dalam setiap gerak-gerik dan keseluruhan perilaku aparatur negara atau sejauh mana pengejawantahan tuntutan tersebut harus mampu dijabarkan secara positif dalam setiap cipta, rasa dan karsa aparatur negara.

Dalam perjalanan sejarah pemerintahan Republik Indonesia dan proses pembangunan masa lalu dan sekarang merupakan barometer untuk menetapkan langkah-langkah dan strategi yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan oleh aparatur negara di masa depan. Sikap mental dan budaya kerja lama yang masih belum optimal cenderung mengesampingkan nilai-nilai ideal. Sikap arogansi dan monopoli yang merupakan budaya "siapa kuat itulah yang berkuasa" atau "mumpung lagi ada kesempatan" adalah sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai keterbukaan. Sikap ini tentunya akan menghilangkan keleluasaan bagi setiap warga negara untuk berkompetisi secara sehat dan benar menurut falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila.

Karenanya, tidak perlu ada pengulangan sejarah lama tersebut ke dalam tubuh aparatur negara. Diperlukan suatu restrukturisasi dan reformasi untuk mewujudkan aparatur ideal karena aparatur negara, secara konstitusional, telah terpilih dan dipercaya mengemban amanat penderitaan rakyat.

Aparatur Negara : Kini dan Esok

Ketika membuka Seminar Nasional Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 1997 di Istana Negara, Presiden Soeharto mengatakan bahwa tidak cukup jika aparatur negara hanya berperan sebagai pelaksana rutin dari peraturan-peraturan belaka.² Untuk itu, aparatur negara harus mampu secara fleksibel dan adaptif memainkan peranannya dalam berbagai tahapan perkembangan masyarakat yang harus dilayani dan tuntutan pembangunan yang menyeluruh dan bukan untuk lapisan tertentu saja.

¹Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian disebutkan bahwa pegawai negeri terdiri dari pegawai negeri sipil dan ABRI.

²Pieter Sanga Lewar, "Aparatur Negara dan Kultur Pengabdian", *Kompas* No. 191 Tahun ke-33 tanggal 9 Januari 1998, hal. 4.

Budaya priyayi yang selalu menuntut untuk dilayani sudah tidak cocok lagi dipraktekkan karena memang budaya ini bertentangan dengan hakikat hidup manusia sebagai makhluk sosial, yang mana orang sedikitlah yang melayani orang banyak, bukan sebaliknya. Jika hal ini terjadi, maka jadilah aparatur negara seperti "tuan" yang menuntut orang lain untuk hormat kepadanya, "upeti", dan minta dilayani.

Selanjutnya, menurut Presiden Soeharto, aparatur negara yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan jaman akan menjadi penghambat pembangunan, bahkan akan menjadi beban bangsa dan negara. Pada bagian lain dalam Pidato Kenegaraan tahun 1998. Presiden Soeharto secara arif mengemukakan aparatur negara yang bersih dan berwibawa justru akan mendatangkan rasa tentram di hati rakyat.³ Adanya kondisi yang demikian akan membawa pengaruh kepada peningkatan gairah masyarakat untuk membangun serta akan merupakan kekuatan ampuh untuk menegakkan disiplin nasional.

Apabila kita amati kondisi saat ini, maka optimalisasi antara harapan dan kenyataan masih perlu kerja keras untuk mewujudkannya. Hal ini karena budaya kerja yang cenderung mencari keuntungan pribadi masih mewarnai sikap dan perilaku sebagian besar aparatur negara. Etika pegawai negeri, yang bersumber dari nilai luhur Pancasila, belum mampu diwujudkan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan. Dalam kerangka seperti ini, dapat dibenarkan salah satu kesimpulan yang dihasilkan oleh Seminar Perkembangan Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional dari LIPI tahun 1970 yang menyatakan "Sikap mental orang Indonesia umumnya belum siap untuk pembangunan".⁴ Padahal posisi dan peran aparatur negara terus menjadi perhatian karena hampir sebagian besar hidup diatur dan ditentukan oleh negara melalui

³Ibid.

⁴Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 32.

aparaturnya.⁵

Oleh karena itu, apabila rakyat masih mengikuti dan senantiasa mengamati gerak-gerik aparatur negara, maka hal tersebut harus disambut. Hal ini dapat menunjukkan budaya demokrasi di Indonesia masih dijunjung tinggi. Barangkali, suatu negara yang rakyatnya tidak peduli atas hal-hal yang dilakukan oleh aparatur negara, maka ada dua kemungkinan yang terjadi apakah mereka hidup dalam negara otoriter atau mereka sudah terlalu kuat dan berkuasa sehingga tidak lagi membutuhkan kekuasaan lain yang datangnya dari negara (anarki).⁶

Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi abad ke-21 yang sarat dengan kompetisi dan kemajuan ilmu serta teknologi. Masyarakat semakin berfikir secara rasional, fungsi ideologi tradisional sebagai kekuatan pengikat makin berkurang dan bahkan legitimasi religius dalam masyarakat industri tidak memegang peranan yang berarti lagi.

Tantangan di masa yang akan datang bagi aparatur negara semakin besar dan bervariasi sifatnya, ia akan berhadapan dengan berbagai tugas dan permasalahan kenegaraan dan kemasyarakatan dengan pengaruh luar yang semakin menembus lapisan masyarakat sampai ke desa-desa terpencil. Tidak hanya pengaruh dari luar, tetapi godaan dari dalam juga sungguh luar biasa banyaknya sehingga tidak sedikit jumlahnya aparatur negara yang telah terjerumus ke dalamnya. Oleh karena itu, manusia Indonesia (aparatur negara) dituntut untuk memiliki visi atau nilai budaya yang berorientasi ke depan.⁸ Nilai budaya semacam ini mendorong kita untuk melihat dan merencanakan masa depan dengan lebih seksama dan teliti, selalu berusaha

⁵Miftah Thoha, *Birokrasi Indonesia dalam Era Globalisasi*, (Jakarta : Pusdiklat Pegawai Depdikbud, 1995), hal. 99.

⁶Ibid.

⁷H.J.M. Classen dan R.G. Soekadijo, *Antropologi Politik Suatu Orientasi*, (Jakarta : Erlangga, 1987), hal. 63.

Penutup

mementingkan orang banyak demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Bagi aparatur negara perlu juga menghindari mentalitas yang bernafsu untuk mencapai tujuannya secepat-cepatnya tanpa banyak kerelaan untuk berusaha secara optimal. Sekarang ini tampak pula terlampau banyak pegawai yang ingin segera mencapai fasilitas-fasilitas pangkat dan jabatan tinggi dalam waktu secepat-cepatnya dengan cara-cara "menerabas" (mentalitas mencari jalan gampang).⁹ Padahal di era global nanti aparatur negara harus mampu bekerja keras, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta dibarengi oleh sikap dan tingkah laku yang terpuji sehingga segala tutur kata dan perbuatannya dapat diteladani dan diikuti oleh masyarakat.

Tema pokok pembangunan pada masa pembangunan jangka panjang (PJP) II adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, aparatur negara mendapat tempat yang utama dalam upaya peningkatan SDM tersebut.

Tingkat kehidupan dan pendidikan masyarakat yang semakin meningkat akan makin mendorong proses pemberdayaan (*empowering*) yang dialami masyarakat. Adanya kerjasama dan kesepakatan melakukan hubungan secara luas antara negara-negara di dunia serta harapan masyarakat akan kebutuhan pelayanan yang korek dan cepat, jusru menuntut aparatur negara segera berupaya meningkatkan kualitas diri dan kemampuannya secara maksimal, serta dibarengi dengan kualitas iman dan taqwa yang teruji dan pasti segala rintangan dan krisis yang terjadi dapat dihadapi dan ditanggulangi di bawah ridha Tuhan Yang Maha Esa.

⁹Koentjaraningrat, *op.cit.*, hal. 34

⁹*Ibid.*, hal. 46-47



Drs. Shabri A lahir di Aceh Selatan pada tanggal 5 Mei 1957. Setelah menyelesaikan pendidikan SMTA di Tapaktuan, kemudian pada tahun 1977 melanjutkan studi ke Jurusan Civics Hukum dengan program minor pada jurusan sejarah Fakultas Keguruan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dan selesai tahun 1982. Selama masa kuliah aktif sebagai asisten dosen pada perguruan tinggi negeri dan swasta. Selain itu, aktif juga dalam berbagai penelitian di antaranya penelitian Regional Indoconsult di Aceh Utara, Inventarisasi Pengembangan Sekolah Dasar Repelita III dan Penyusunan Draf Repelita IV Sektor Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Sejak 1984 bekerja di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Selain tugas rutin yang dikerjakannya, ia juga aktif dalam berbagai seminar, loka karya dan penataran. Pernah mengikuti diklat penjenjangan, di antaranya diklat penjenjangan SEPALA angkatan LXIV tahun 1994 dan SPAMA angkatan XXI 1996. Saat ini, ia menduduki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.

Menyimak Kepemimpinan di Aceh pada Zaman Kerajaan dan Zaman Perang Kemerdekaan

Oleh Elita Batara Munti

Perkembangan manusia dari waktu ke waktu semakin menuntut pengaturan-pengaturan yang mengarah pada segala aspek kehidupan dengan tujuan kesejahteraan sepanjang masa hidupnya. Perwujudan dari keadaan yang dikehendaki memerlukan individu yang memiliki kemampuan untuk merubah apa yang ada dan mengembangkannya ke arah yang lebih baik. Namun tidak hanya individu yang memiliki kemampuan teknis semata untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Diperlukan pula dalam hal ini dan cenderung memiliki peran yang amat penting - adalah individu yang mampu mengumpulkan massa dalam suatu tatanan sehingga akan memudahkan nantinya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Individu yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang pemimpin yang memiliki massa dari berbagai tingkat dan jenis.

Ukuran yang ditentukan terhadap keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya dilihat hanya dari banyak sedikitnya massa pengikutnya, namun juga dapat dilihat gaya kepemimpinan yang turut menentukan patut tidaknya seorang pemimpin membawahi suatu daerah kekuasaan berikut adat istiadatnya. Indonesia sebagai wilayah yang memiliki kebhinekaan yang cukup luas tentunya juga memiliki berbagai tipe kepemimpinan yang condong kepada adat istiadat daerah tertentu dan salah satunya dapat ditemukan pada Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Arti

Pemimpin tradisional pada masyarakat Aceh dikenal dengan istilah *ulee*¹ meskipun ada

pengertian lain dalam arti denotatif yaitu kepala. Namun demikian istilah *ulee* adalah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari masyarakat Aceh untuk menyebutkan arti yang sesungguhnya (denotatif) dan jarang untuk mengistilahkan pemimpin suatu lembaga tertentu. Hanya beberapa saja dari penyebutan pemimpin dengan istilah *ulee* di antaranya adalah *Uleebalang* yang lazim digunakan pada masa kerajaan dan masa awal perjuangan kemerdekaan. Tugas *Uleebalang* adalah mengepalai sebuah *Nanggroe* dan mengkoordinir tenaga-tenaga tempur dari daerah kekuasaannya bila ada peperangan. Selain itu juga menjalankan instruksi dari Sultan termasuk di antaranya adalah pembayaran upeti kepada kerajaan. *Uleebalang* termasuk tipe pemimpin yang sangat berkuasa di daerah mereka sendiri serta bebas untuk menentukan hukuman. Pada masa pemerintahan Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin Syah (1675 - 1678) Kerajaan Aceh memiliki tiga *Uleebalang* dengan tiga wilayah kekuasaannya (*Lhee Sagoe*).² Selain *Uleebalang*, istilah tradisional untuk menyebut seorang pemimpin di Aceh di antaranya adalah *keuchiek*, *sultan/sultanah*, *imuem mukim*, *imuem meunasah* dan lain-lain.

Secara umum pembagian jenis kepemimpinan tradisional dalam masyarakat Aceh terbagi dua bagian, yaitu pemimpin dalam bidang agama dan pemimpin dalam bidang pemerintahan. Pemimpin dalam bidang pemerintahan memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat dalam bentuk yang dibedakan berdasarkan jenis kekuasaannya. Kekuasaan itu sendiri menurut adat Aceh memiliki 10 azas pokok, yaitu :

1. Tahta yang bertumpu pada kekuasaan
2. Ketegasan dalam pemerintahan
3. Kesabaran apabila sedang murka.

¹Nasruddin Sulaiman et al., *Aceh Manusia Adat dan Budaya Edisi I*, (Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1992), hal. 76.

²*Ibid.*, hal. 42.

4. Mengangkat yang lemah
5. Merendahkan yang besar kekuasaannya
6. Menghormati yang hina
7. Merendahkan yang sombong
8. Mematikan yang hidup dan menghidupkan yang mati
9. Keikhlasan sewaktu mendengarkan orang yang menghadap
10. Kemasyhuran dalam peradilan yang tersiar sampai ke luar negeri.³

Terlihat dalam 10 azas pokok kekuasaan di atas, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang disegani dan berkuasa atas masyarakatnya tidaklah mudah dicapai dengan jalan pintas. Oleh karena itu beberapa data sejarah mencatat kegagalan seorang pemimpin pada masa Kerajaan Aceh untuk mengangkat wilayah kekuasaan ke tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Beberapa contoh dapat disebutkan di sini di antaranya Sultan Alauddin Ri'ayat Syah (Sultan Muda) yang gagal merebut simpati para ulama karena perbuatannya sendiri yang dinilai banyak bertentangan dengan ajaran agama Islam sehingga ia berhasil diganti oleh Sultan Iskandar Muda berkat dukungan dari para ulama. Selain itu, dapat pula dilihat proses penggantian Sultan Salahuddin oleh Sultan Alauddin Ri'ayat Syah Al Kahar karena tidak senang atas kepemimpinan Salahuddin yang lemah dan tidak membawa kemajuan bagi Kerajaan Aceh.

Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin tradisional ada pula yang dipergunakan terutama pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan banyak ditujukan pada bidang pemerintahan. Kekuasaan seorang pemimpin Aceh pada masa itu adalah mereka yang bergelar *teuku*.⁴

³Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), hal. 230.

⁴Indikasi tersebut akibat Belanda yang hendak memecah antara golongan *teuku/Ulee balang*, *Teungku/ulama*, dan golongan Sultan melalui *Korte Verklaring* (perjanjian pendek) pada masa pemerintahan Van Heutz. Untuk lebih jelasnya lihat Mardanas Safwan, *Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arif*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1992), hal. 7.

Salah satu di antaranya adalah Teuku Ne'Meuraksa yang berasal dari kaum *Ulee balang* yang telah mencoba menyusupkan 4.000 tentara untuk membantu Belanda merebut kerajaan Aceh yang kala itu dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah II.⁵ Gelar *teuku* tersebut sekaligus membedakannya dengan gelar *teungku* yang disandang oleh pemimpin Aceh dalam bidang keagamaan.

Kepemimpinan yang bergelar *teuku* dan *teungku* untuk memerintah massa dalam berbagai periode waktu tidak diartikan sebagai orang yang berkedudukan pada suatu lembaga resmi semata. Soekanto membedakan kedudukan pemimpin di pemerintahan dalam dua bagian, yaitu kepemimpinan yang bersifat resmi (*formal leadership*) yaitu seorang yang memimpin dalam suatu jabatan dan didasarkan atas pengakuan masyarakat akan kemampuannya untuk menjalankan kepemimpinan, dan di dalam pelaksanaannya selalu harus berada di atas landasan/peraturan resmi kepemimpinan. Yang kedua adalah kepemimpinan tidak resmi (*informal leadership*) adalah jenis kepemimpinan yang memiliki ruang lingkup tanpa batas resmi karena didasarkan atas pengakuan masyarakat dan kepercayaan masyarakat.⁶

Pada masa perjuangan kemerdekaan, beberapa pemimpin resmi di antaranya memakai gelar *teuku*, yaitu Teuku Nyak Arif yang pernah menjabat sebagai Residen Aceh melalui Surat Ketetapan Gubernur Sumatera nomor I - X tanggal 3 Oktober 1945.⁷ Sementara itu, golongan *teuku* yang menjadi pemimpin tak resmi di antaranya adalah Teuku Umar yang berjuang bersama pengikutnya untuk merebut kembali wilayah VI *Mukim* di Aceh Barat yang telah jatuh ke tangan Belanda.⁸ Pemimpin Aceh lainnya yang cukup

⁵Nasruddin Sulaiman et al., *op cit.*, hal. 52.

⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1986), hal. 265.

⁷Rusdi Sufi et al., *Enam Pahlawan Nasional Asal Aceh*, (Banda Aceh : BKSNT Banda Aceh, 1997), hal. 90

⁸Muchtaruddin Ibrahim, *Cut Nyak Din*, (Jakarta : Depdikbud RI, 1996), hal. 39.

berpengaruh adalah Teuku Ibrahim Lamnga yang berupaya menahan serangan Belanda terhadap bentengnya di Geunca dan Keutapang dua sebagai wilayah pertahanannya di garis perbatasan VI *Mukim*. Selain itu ia juga turut membantu wilayah IX *Mukim* dan wilayah III *Mukim* (juga di Aceh Barat) yang telah jatuh terlebih dahulu ke tangan Belanda.⁹

Golongan bergelar *teungku* lebih condong pada gelar pemimpin tidak resmi dalam bidang keagamaan. Namun demikian tidak berarti mereka hanya terpaku pada masalah keagamaan semata. Pada masa perjuangan kemerdekaan, golongan *teungku* merasa turut mempertahankan - terutama - wilayah mereka yang telah dirampas oleh penjajah.

Visi perjuangan golongan bergelar *teungku* tentunya berbeda dengan yang dijalankan oleh golongan *teuku*. Sebagian besar dari golongan *teungku* mempunyai dasar keagamaan yang kuat dan cenderung menganggap penjajah berasal dari golongan kafir yang tidak pantas berada di bumi Aceh sehingga harus diusir agar kesucian wilayah mereka tetap terjaga. Perjuangan gigih dari golongan *teungku* dapat dilihat di antaranya yang telah dilakukan oleh Teungku Cik Di Tiro, seorang ulama yang mampu mem bakar semangat 6.000 orang melalui seruan Perang Sabil (perang di jalan Allah) untuk mengusir kafir/penjajah dari wilayah mereka.¹⁰ Kemudian di kawasan Aceh bagian barat terdapat nama Teungku Di Barat, sebagai salah satu murid Teungku Di Mata Ie, yang memperjuangkan wilayahnya di Aceh Bagian Barat hingga wafat tahun 1912.¹¹ Zentgraff memuji atas perjuangannya dengan mengatakan "Comme ils tombent bin", dan adakah bangsa di muka bumi ini, yang tidak akan mencatat dengan rasa hormat yang mendalam pada lembaran buku sejarah mereka, mengenai gugurnya tokoh heroik ini ?¹²

Dalam organisasi pemerintahan

tradisional, gelar *teungku* turut diberikan kedudukan khusus sebagai orang alim dan berada dalam barisan pembantu *Keuchiek* (kepala kampung) bersama dengan golongan *ureung tuha/tuha peut* (orang tua/dewan penasehat).¹³

Pada masa Kerajaan Aceh, para pemimpin kerajaan Aceh banyak bergelar Sultan. Penamaan Sultan tidak lepas dari pengaruh Timur Tengah, terutama Kerajaan Turki.¹⁴ Intensitas hubungan dagang yang semakin meningkat dimulai sejak Sultan Ali Mughayat Syah - sebagai peletak batu pertama perkembangan Kerajaan Aceh¹⁵ yang menjalin hubungan ekonomi dan militer. Hubungan militer digunakan Sultan Ali Mughayat Syah untuk melawan Portugis yang kala itu masih menguasai Malaka.¹⁶ Setelah Kerajaan Aceh berdiri pada landasan yang lebih kokoh, pengganti Sultan Ali Mughayat Syah pada periode berikutnya turut memakai gelar Sultan, seperti Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Ri'ayat Syah Al Kahar, Sultan Abdul Jalil, Sultan Mansyur Syah, Sultan Iskandar Muda.

Cara Kepemimpinan

Telah jelas bahwa pemimpin mempunyai fungsi sebagai pemersatu kelompok massa dalam suatu aturan, baik resmi maupun tak resmi, dan pemberian sanksi atau tidak apabila melanggar aturan tersebut. Gambaran umum tentang fungsi pemerintahan tersebut dapat ditemukan pada berbagai tipe kepemimpinan. Namun demikian, jika dilihat pada segi cara kepemimpinan akan ditemukan berbagai perbedaan, bahkan dapat terlihat meski pada kelompok massa dalam jumlah yang relatif sedikit sekalipun.

Pada masa Kerajaan Aceh, kepemimpinan yang dilakukan oleh para Sultan Aceh banyak berpedoman pada ajaran Islam¹⁷. Hal ini dimungkinkan terjadi karena dari banyak

⁹*Ibid.*, hal. 26.

¹⁰Rusdi Sufi et al., *op cit.*, hal. 6.

¹¹Zentgraff, *Aceh*, (Jakarta : Depdikbud Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1982), hal. 163 - 164.

¹²*Ibid.*, hal. 167.

¹³Nasruddin Sulaiman et al., *op cit.*, hal. 73.

¹⁴Denys Lombard, *op cit.*, hal. 50, 288 - 197

¹⁵*Ibid.*, hal. 49.

¹⁶Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid 1*, (Medan : Waspada, 1981), hal. 179.

¹⁷Denys Lombard, *op cit.*, hal. 101.

jalanan hubungan yang ada, Timur Tengah memiliki keeratan hubungan dengan Aceh baik dari segi perdagangan, pendidikan dan militer. Konsekuensi yang terjadi dengan adanya penerapan ajaran Islam dalam pemerintahan di Kerajaan Aceh terjadi pada zaman Sultan Iskandar Muda. Kitab perundangan juga berkiblat pada makna ajaran Islam untuk kemudian digabungkan dengan adat istiadat Aceh dan lebih dikenal dengan nama *Adat Meukuta Alam*.

Pada masa penjajahan Belanda, dimana kekuasaan sultan telah mulai pudar akibat kekalahan Sultan Ala'addin Muhammad Daud Syah pada tahun 1903 yang sekaligus mengakhiri masa kesultanan di Aceh.¹⁸ Kaum *Ulee balang* yang telah dipengaruhi pada akhirnya menjalankan pemerintahan dengan cara-cara kolonial. Bukti yang menandakan pengaruh tersebut dapat dilihat dari pemilihan *keuchiek* (kepala Desa). Calon yang diunggulkan sebagai *keuchiek* terpilih menurut aturan pada masa kolonial adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan kaum *Ulee balang* - yang telah dipengaruhi garis kolonial - sehingga pemerintah Belanda akan mudah menyalurkan instruksi-instruksi melalui kepala desa.¹⁹ Sementara itu, para perangkat desa yang terdiri dari *teungku meunasah* dan *ureung tuha* dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mempunyai kemampuan di bidang agama dan adat yang relatif tinggi.
 2. Memiliki kemampuan ekonomi yang relatif baik.
 3. Memiliki penampilan yang berwibawa.
- Namun sebagaimana kepala desa, para perangkat desa juga harus tunduk pada apa yang

telah digariskan dalam sistem pemerintahan kolonial. Apabila membangkang, maka para *ulee balang* - atas desakan pemerintah Belanda - akan memecat kepala desa berikut aparatnya untuk kemudian digantikan dengan calon yang lebih taat pada pemerintah kolonial Belanda.²⁰

Penutup

Propinsi Daerah Istimewa Aceh kini telah/sedang mengadakan pembangunan di segala bidang terutama untuk meningkatkan citra keistimewaan Aceh dalam bidang adat istiadat, pendidikan dan agama. Pemerintahan yang baik amat diperlukan untuk mencapai citra tertinggi sebuah propinsi yang bergelar daerah istimewa ini.

Guna menunjang pencapaian suatu pemerintahan yang diinginkan bersama, maka ada baiknya dapat melihat pengalaman yang telah dilakukan oleh para pemimpin pada masa sebelumnya yang telah mampu membawa massa untuk bersatu dalam memperebutkan, mempertahankan kemerdekaan, atau bahkan memperluas wilayah kekuasaannya yang terjadi pada masa kerajaan.

Kemampuan yang dimiliki oleh beberapa pemimpin Aceh sejak zaman kerajaan hingga zaman perang kemerdekaan memang tidak dapat diragukan lagi meski dalam dua periode tersebut terdapat dua perbedaan visi, di mana pada masa kerajaan para sultan berupaya memperkuat angkatan perangnya agar dapat menahan dan menggempur musuh serta menyerang wilayah kekuasaan lain guna perluasan wilayah Kerajaan Aceh. Lain visi dari hal tersebut, para pemimpin pada masa perjuangan kemerdekaan banyak mengutamakan visinya untuk mempertahankan dan mengusir penjajah terutama dari bumi Aceh.

Cara kepemimpinan yang dilakukan pada masa kesultanan Aceh banyak mengandung unsur otoritas kekuasaan, yang dalam hal ini banyak dilakukan pula oleh kerajaan lainnya

¹⁸Nazaruddin Syamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik, Kasus Darul Islam Aceh*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1990), hal. 17. Lihat juga Insider, *Aceh Sepintas Lalu*, (Jakarta : Azhapada, 1950), hal. 7.

¹⁹Saed Ermia, *Sistem Pemilihan Kepala Desa Dulu dan Sekarang Studi Kasus di Kecamatan Gandapura Aceh Utara*, (Banda Aceh : Pusat Pengembangan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Syiah Kuala, 1990), hal. 31.

²⁰Ali Basyah Amin et al., *Pemerintahan Desa Suatu Studi Hasil Penelitian Di Pidie Dan Aceh Tengah*, (Jakarta : Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1988), hal. 15.

di Indonesia dahulu. Sikap yang otoriter memang amat diperlukan pada waktu itu karena kekuasaan baru dilahirkan, sehingga lahir disimetri-disimetri yang mempengaruhi hubungan sosial, dalam arti menciptakan jarak pembeda yang berfungsi bagi masyarakat.²¹ Otoritas sultan/raja tercipta dengan cara menyatukan/dicipta dan dihubungkan antara berbagai elemen dalam masyarakat satu dengan yang lain. Situasi yang masih baru bagi masyarakat untuk memahami arti kekuasaan kemudian memaksa sultan untuk melakukan pemaksaan tata aturan agar masyarakat dapat bersatu dibawah payung kerajaan sehingga menciptakan suatu kekuatan yang diatur (*par excellence*) langsung oleh sultan.

Kekuasaan sultan cenderung absolut bahkan mengarah pada penyanjungan yang berlebihan dan kurang rasional. Hal tersebut tercantum pada asal-usul Sultan Iskandar Muda yang dikatakan dalam hikayat Aceh berasal dari seorang puteri berdarah putih, puteri kahyangan, keturunan Maha Bisnu. Penyanjungan yang demikian hebat pada diri Sultan Iskandar Muda dimungkinkan karena jika melihat penjelasan Balandier maka ditemukan adanya keerratan antara atribut kekuasaan dengan atribut kesucian yang muncul dari magi dan religi.

Seiring dengan berjalannya waktu, dan mulai masuknya pengaruh politik asing yang dilakukan oleh penjajah (terutama Belanda) terhadap sistem pemerintahan di Aceh, maka

bentuk pemerintahanpun lama kelamaan berubah dan mengikuti gaya pemerintahan kolonial. Para pemangku adat dan agama di Aceh kemudian menjadi kurang berfungsi sebagaimana mestinya karena tidak memiliki peran penting dalam sistem kolonial. Keadaan yang demikian menurut Balandier dapat menimbulkan desakralisasi parsial atas kekuasaan karena pengesahan pemangku adat dan agama kini berada ditangan pemerintah kolonial. Dengan demikian prosedur yang telah berjalan secara turun temurun di Aceh tidak berlaku pada pemerintahan kolonial.²²

Perkenalan dengan birokrasi barat terjadi pada masa perjuangan kemerdekaan dengan tokoh di antaranya Teuku Nyak Arif, Teuku Hasan Dik dan Teuku Daud Beureueh. Karena masih dalam suasana perebutan kekuasaan, para tokoh tersebut melakukan berbagai cara di antaranya usaha diplomasi yang didukung penuh oleh rakyat Aceh untuk memaksa Belanda menyerahkan wilayah jajahannya ke tangan rakyat Aceh. Dorongan penuh dari rakyat membuktikan penyerahan kepercayaan sepenuhnya kepada pemimpin mereka untuk mendapatkan kemerdekaan, yang nyatanya berhasil dilakukan. Beranjak dari penggambaran cara kepemimpinan di Aceh, baik dilakukan pada zaman kerajaan maupun zaman perang kemerdekaan, dapat diambil satu kata kunci menuju kesuksesan pencapaian tujuan yaitu kepercayaan penuh rakyat kepada pemimpinnya.

²¹Georges Balandier, *Antropologi Politik*, (Jakarta : Rajawali, 1986), hal. 101.

²²*Ibid.*, hal. 211.



Elita Batara Munti, S.Sos lahir pada tanggal 27 Maret 1971 di Yogyakarta. Setelah menamatkan SMTA di SMA 38 Jakarta, kemudian melanjutkan studi di Universitas Andalas Padang Sumatera Barat pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Antropologi. Saat ini bekerja pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.

Budaya Suksesi dan Kekuasaan

Oleh Iriani Dewi Wanti

Berbicara mengenai konsep kekuasaan tradisional di Indonesia, umumnya kita lebih banyak menemukan literatur yang berorientasi pada teori politik Jawa. Sedikit sekali referensi yang menganalisa konsep-konsep kekuasaan tradisional daerah-daerah lain di Indonesia, meskipun dari tiap-tiap daerah tersebut memiliki spesifikasi yang berlainan. Sebut saja misalnya di Sulawesi Selatan dari kesusastraan Bugis *Latowa* adalah ajaran akan hal-hal mengenai kepemimpinan raja yang adil dan bermurah hati, yang menjaga keamanan dan ketentraman negara, masalah sumber-sumber dan cara-cara memelihara kekuasaan, hubungan dengan rakyat dan sebagainya. Di Aceh pemerintahan lebih khas dan identik dengan sendi-sendi keislaman. Hal ini tentu saja berlangsung demikian mengingat Kerajaan Aceh telah menerapkan konsep keislaman sehingga menjadi salah satu kerajaan Islam di Nusantara.

Mengapa Jawa lebih dominan? Budaya Jawa banyak mendominasi budaya politik nasional. Memang tidak dapat dipungkiri, setidaknya ada tiga alasan penting yang melatarbelakangi kondisi ini yaitu

1. Posisi penting di pemerintahan saat ini sedang didominasi elit-elit Jawa.
2. Jawa, baik pada masa tradisional, kolonial maupun pasca kemerdekaan, menjadi pusat pemerintahan.
3. Etnik Jawa merupakan proporsi yang lebih separuh dari penduduk di Indonesia.

Para ahli Antropologi pernah mengumpulkan dan menganalisa sejumlah data mengenai berbagai macam aspek dan masalah kepemimpinan dan kekuasaan tradisional. Ada baiknya apabila terlebih dahulu kita kembali memahami apa itu kekuasaan dan apa hubungannya suksesi.

Suksesi dan Kekuasaan

Suksesi adalah peralihan kekuasaan atau

pergantian kekuasaan yang biasanya dilakukan dengan berbagai strategi dan permainan politik untuk mencapainya. Tentu saja erat kaitannya dengan kekuasaan karena orang berhasil mencapai suksesi tentulah akan mempunyai kekuasaan. Selanjutnya, kita akan menelaah apa itu kekuasaan. Kebanyakan sarjana berpangkal tolak dari perumusan sosiolog Max Weber dalam bukunya *Wirtschaft und Gesellschaft* (1922) bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kemauan sendiri dalam suatu hubungan sosial, sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemauan itu.¹

Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kekuasaan adalah suatu hubungan yang mana seseorang atau kelompok orang menentukan tindakan orang lain agar sesuai dengan tujuan dari pihak pertama (*power is relationship in which are person or group is able to determine the action of another in the direction of the formers's own end*).

Dalam pendefinisian di atas sebagian pendapat umumnya telah merumuskan bahwa kekuasaan tidak hanya dapat membatasi alternatif untuk bertindak, seperti yang dikatakan oleh Van Doorn, akan tetapi kadang-kadang juga malahan memperbesar dan memperluas alternatif untuk bertindak.² Bahkan ada juga yang menghubungkan kekuasaan dengan wewenang (*authority*).

Berbicara masalah pemimpin, secara tradisional Koentjaraningrat memberikan gambaran bahwa kekuasaan tradisional mempunyai komponen-komponen kekuasaan serta sifat-sifat yang menjadi syarat bagi seorang pemimpin. Komponen kekuasaan itu adalah

¹Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991) hal. 16.

²*Ibid.*, hal. 17.

kewibawaan, wewenang, kharisma, kekuasaan dalam arti khusus.

Menurut Encyclopedia of Anthropology kepemimpinan bukan hanya berkenaan dengan kualitas kepribadian atau kharisma seseorang pemimpin, tetapi lebih ditekankan kepada pelaksanaan peranan dalam suatu konteks sosial. Jadi, kepemimpinan adalah suatu proses interaksi antara pemimpin dan anggota-anggota lain dalam kelompoknya. Dalam struktur sosial, seorang pemimpin umumnya menduduki posisi yang menjadi titik penentu (*local point*) pembuat keputusan. Karena itu kepemimpinan mestilah dilihat dalam konteks kelompok atau tindakan kolektif.

Pendekatan Budaya

Bagaimanapun berbicara mengenai kepemimpinan kita tidak terlepas dari pembicaraan politik, hanya saja kita dapat memahami politik Indonesia melalui pendekatan budaya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa budaya Jawa memang mendominasi budaya politik nasional.

Hindunisasi di Nusantara tidak saja mengakar pada budaya masyarakat, tetapi juga pada sistem pemerintahannya. Tentu kita masih ingat akan adanya konsep dewa-raja yang pernah diterapkan oleh raja-raja Jawa-Hindu. Pada masyarakat Jawa tradisional, kraton adalah pusat kosmos yang dipegang oleh seorang raja, yang memerintah atas nama dewa. Raja berfungsi sebagai perantara antara dunia bawah atas mandat penguasa alam semesta. Pengangkatan seorang raja dilegitimasi oleh adanya *pulung* suatu tanda bahwa mandat untuk memerintah. Raja bukanlah orang sembarangan, ia titisan Wisnu. Wisnu adalah sosok manusia gaib (dewata) yang diturunkan ke dunia untuk *memayu hayuning bawana* dalam arti membuat dunia menjadi damai, tenteram, aman, dan sejahtera bagaikan surga.

Bertitik tolak dari konsep pemikiran inilah, maka tiap-tiap penguasa Jawa senantiasa menekankan keteraturan, yang terefleksi dari konsep kepercayaan Jawa yang menginginkan kehidupan yang terkoordinir antar manusia dengan alam sekitarnya. Situasi keteraturan harus diperjuangkan, dikondisikan dan bisa dilakukan oleh tiap-tiap orang, namun harus

tetap di bawah payung sang raja. Oleh karena itu, tokoh yang bertanggungjawab terhadap terciptanya keteraturan dan keharmonisan adalah sang raja.

Dalam konsep pemikiran ini raja dianggap sebagai wadah yang mana kekuatan mistis melembaga hingga ia amat berkuasa kekuasaan tersebut diterapkan untuk menjaga keteraturan. Raja yang tidak dapat menciptakan keharmonisan tidak akan dapat menjadi *pandito ratu* suatu konsep raja bijaksana atas pengenalan kekuatan mistis religius.

Di dalam pewayangan yang intinya lebih banyak mengajarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mengajarkan raja ideal adalah yang telah melewati proses panjang, di antaranya dengan memahami ajaran *Makutarama* yaitu wejangan mengenai bagaimana menjadi seorang ksatria atau raja yang ideal dengan menjalankan *Hastabrata*, semacam ajaran moral politik untuk mendapat kecintaan dan dukungan rakyat.

Hal yang perlu dicermati di sini adalah untuk bisa mendapatkan wahyu *Makutarama* atau wahyu kraton ternyata tidak sembarang orang. Mereka adalah manusia-manusia pilihan yang telah teruji mentalitas dan moralnya. Ujian tersebut meliputi pertama, ketahanannya terhadap godaan nafsu duniawi (wanita, harta, dan lain-lain). Kedua, mempunyai jasa besar terhadap rakyat atau negara. Ketiga, bermoral baik (adil, suci, jujur, mencintai sesama). Dan keempat, melakukan laku spiritual untuk mendapatkan anugerah Yang Kuasa. Konsep ini bisa merupakan pendidikan politik pada calon penguasa pada zaman dulu atau di pewayangan. Artinya meskipun mereka (raja) tidak dipilih oleh parlemen, tetapi tak bisa seenaknya kemampuan sendiri.

Konsep pemerintahan yang berkembang pada masyarakat kita memang tidak asing dengan pendekatan terhadap budaya Jawa, tetapi seperti yang telah dikemukakan pada pendahuluan bahwa konsep kepemimpinan dari tiap-tiap daerah bervariasi sesuai dengan budaya yang mendominasi keberadaan masyarakat di dalamnya.

Di Aceh sistem pemerintahan tradisional berakar dari masa Kerajaan Aceh, bahkan mengenai hukum dan pemerintahan pada masa

kekuasaan Sultan Iskandar Muda tersusun dalam suatu kitab undang-undang yang terkenal dengan Adat Meukuta Alam. Dalam kepemimpinan konsep *ureung tuha* (orang yang dituakan) dan *ureung teuleubeh* (yang memiliki banyak kelebihan) dalam masyarakat Aceh mempunyai makna yang cukup besar, dan mempunyai nilai adat, nilai politis, dan nilai agama. Di dalam konsep tersebut Ada tiga pengertian *tuha* dalam istilah tersebut. Pertama, *tuha-tuha* (tua karena banyak tahu), kedua, *tuha-meuphom proe* (tua karena mengetahui hukum adat, hukum agama, dan hukum-hukum kenegaraan lainnya), dan ketiga disebut *tuha-gaseh keu bangsa ngon keu nanggroe* (tua yang memiliki kasih sayang untuk bangsa dan negara. Oleh karena menguasai ketiga hal ini, maka disebut kelebihan. Kriteria ketiganya adalah kriteria yang berkaitan dengan nilai-nilai politik yang berkembang dalam masyarakat Aceh.

Dalam kehidupan bernegara Kerajaan Aceh justru mempunyai konsep pembagian kekuasaan (separation of power) seperti halnya konsep trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Ini dapat dibuktikan dalam kehidupan bernegara masyarakat Aceh tertumpu pada pepatah adat yang berbunyi.

*Adat bhak po teumeureuhom
Hukum bhak Syiah kuala
Kanun bhak Putroe Phang
Reusam bhak Laksamana*

Dengan pengertian sebagai berikut :

1. Adat bhak po teumeureuhom adalah bahwa tata kehidupan pemerintahan bersumber pada Sultan. Sultanlah yang mempunyai kewenangan membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara.
2. Hukum bhak Syiah Kuala adalah bahwa tata hukum yang berkaitan dengan agama menjadi hak tugas para alim ulama dan cerdik pandai. Hukum dan adat memang tidak dapat dipisahkan dalam bahasa Aceh dikatakan *Hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut* (hukum dan adat seperti zat dan sifat-sifatnya). Adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabullah).
3. Kanun bhak Putroe Phang maksudnya

sopan santun, etika dalam pergaulan bersumber pada Putroe Phang (isteri raja).

4. Reusam bhak Laksamana maksudnya tata kehidupan masyarakat merupakan wewenang dari para panglima.

Putroe meureuhom, syiah kuala, putroe phang dan laksamana adalah organ-organ yang melaksanakan adat, hukum, kanun dan reusam. Kekuasaan tersebut dipisahkan secara tegas di mana kekuasaan yang satu tidak dapat mempengaruhi atau mencampuri kekuasaan lain dan begitu sebaliknya.

Mencapai Suksesi

Untuk mencapai suksesi tentu saja diperlukan berbagai kiat, mulai dari ambisi pribadi melalui intrik-intrik dan permainan politik, hingga tindak kudeta yang melahirkan peristiwa berdarah. Kembali pada budaya Jawa dalam mencapai suksesi seseorang harus mendapatkan *pulung*. *Pulung* adalah alat legitimasi kekuasaan, maka siapa yang dapat meyakinkan orang lain bahwa seorang mendapatkannya, maka ada kemungkinan ia dapat berkuasa. Berpindahnya *pulung* ditandai oleh perebutan kekuasaan dengan kekuatan senjata. Dalam kaitan ini *pulung* selalu disertai dengan darah.

Dengan didapatkannya *pulung*, maka usaha yang pertama dilakukan seseorang adalah bagaimana agar *pulung* tidak berpindah tangan. Dengan kekuatan yang dibangun, maka setiap gejala yang dapat mengakibatkan berpindahnya *pulung* segera harus diatasi. Artinya kekuatan-kekuatan oposisi lain dimatikan dengan kekuatan senjata. Langkah selanjutnya adalah bagaimana *pulung* tidak jatuh ke tangan orang lain selain keluarga. Ini disebut dengan suksesi yang feodalisme, artinya dicapai melalui tali kekerabatan bukan dari hasil prestasi kerja. Pewarisan *pulung* ke tangan keluarga besar merupakan tindakan terhadap keselamatan dan keamanan pribadi "mantan raja" dan keluarganya.

Dalam konteks sejarah, masa pemerintahan kerajaan-kerajaan di Aceh juga mengenal sistem dinasti atau pengendalian kekuasaan yang diwariskan secara turun temurun. Pewarisan kekuasaan, terutama

kepada keluarga raja juga tidak terlepas dari intrik-intrik dengan peluang terjadinya perebutan kekuasaan internal sehingga dalam hal ini raja harus mempersiapkan pengganti (putra mahkota) yang sesuai dengan hati nurani raja. Keterlibatan penasehat kerajaan yaitu para ulama adalah penasehat yang berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh sultan.

Meskipun telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidaksanggupan raja dalam mempersiapkan pengganti yang kuat akan berakibat kepada dinasti tersebut, meskipun merupakan alternatif bagi seorang yang merasa hak-haknya direbut. Andaikata ini terjadi maka akan berakibat pada lemahnya dinasti. Untuk merebut kekuasaan, seringkali kekuatan-kekuatan *outsider* bersatu untuk membangun kekuasaan suatu dinasti.

Penutup

Suksesi merupakan kata yang sederhana tetapi memiliki arti penting bagi terjadinya perubahan dalam struktur politik, ekonomi dan budaya dalam masyarakat. Tidak mengherankan apabila suksesi dapat dikaitkan dengan berbagai unsur di atas.

Menyoroti suksesi yang dicapai melalui berbagai pendekatan budaya, sering kali kita dihadapkan pada akar budaya mana yang lebih menonjol dalam kehidupan masyarakat kita (bangsa Indonesia) meskipun dalam konteks ini

berbagai konsep pemerintahan tradisional dimiliki oleh tiap-tiap daerah di Indonesia. Salah satu contoh Desa secara etimologisnya berasal dari bahasa Sanskerta *swadesi* yang artinya tanah asal namun untuk menyelaraskan dan menyatupadukan hukum dan pemerintahan yang ada di Indonesia maka istilah *gampong* dan *mukim* (Aceh), *nagari* (Minangkabau), *matowa* (Bugis), *geukang* (Makasar) dan lain-lain, diselaraskan dengan sebutan desa untuk tingkat pemerintahan terendah di Indonesia.

Untuk mencapai suksesi seseorang melakukan dengan berbagai kiat. Selain kemampuan juga dituntut bakat dari seseorang untuk menjadi pemimpin. *Pulung* tidak begitu saja jatuh dari langit, orang yang menerima *pulung* tentulah orang-orang pilihan. Demikian juga dalam konsep pemerintahan tradisional di Aceh yang identik dengan Islam, maka untuk mengangkat seorang pemimpin sangat memperhatikan bagaimana seorang calon pemimpin dapat menyelaraskan antara kepentingan-kepentingan duniawi dan ukhrowi. Apabila hal itu dilaksanakan maka diharapkan akan menjadi pimpinan yang adil dan bijaksana, maka melalui kajian terhadap konsep pemerintahan tradisional Jawa dan Aceh seperti yang telah diuraikan di atas nyatalah pada kita bahwa bagaimanapun seorang pemimpin adalah orang-orang yang diteladani, punya wibawa dan dipercaya oleh rakyatnya.



Irini Dewi Wanti, SS lahir pada tanggal 23 Mei 1971 di Medan. Setelah menamatkan pendidikan SLTA di SMA Negeri 3 Medan mengikuti pendidikan Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara (USU) Medan dan menyelesaikan gelar sarjananya di sana pada tahun 1994.

Sejak 1995, bekerja sebagai staf Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. Selain penelitian, ia aktif pula menulis artikel di Harian Umum Serambi Indonesia, Banda Aceh.

Banta Amat

Nasib seseorang tidak ditentukan oleh strata sosial yang melatarbelakanginya. Ini tercermin dalam kisah Banta Ahmad anak seorang raja. Setelah mengalami cobaan hidup yang berat barulah dia menjadi raja pada satu negeri. Sedangkan Raja Ahmad, anak orang miskin yang menjadi saudara angkat Banta Ahmad tanpa kendala menjadi raja pada negeri lainnya. Namun, kedua raja ini sangat dicintai oleh rakyat mereka.

Na saboh raja di nangroe antah beurantah. Raja nyan hawa that keuaneuek. Sabab meunyo hana aneuk hana soe teruskan keurajaan. Jadi geumeukaöi "teuk bak saboh malam, lheuh geuseumbahyang mugrëb geumeukaöi teuk dua-dua ngon peurumoh. "Beuna keuh aneuk di lön Ya Allah Ya Tuhanku. Kupeupeungon aneuk gasien". Teukeudi rollah kaoi awak nyan teukabui. Hamel keuh putroe nyan hingga lahë sidroe aneuk agam; lagak that rupajih. Seujak lahë aneuk nyan jimoe keuh sabë. Rupajih raja tuwokeu kaöi gobnyan dilëe. Teupike raja, "paken jimoe aneuk nyoe sabe?"

Peurintah raja geuyue jak ngieng nujum. "Oh lheuh geu rama lé nujum., leumah teuk lam ramalan nujum bahwa raja na geumeukaöi. Watee lahe aneuk gobnyan geubri ngon ngon sidroe aneuk gasien. "Ka beutoi, "Kheun raja. Geupeurintah teuk Peudana meuntroe geuyue jak cok sidroe aneuk gasien, geuyue jak mita. Pat-pat nyang na, geuyue mé keunoe. Jijak keuh keudëh jioh lam uteuen. Trök keunan na saboh rumoh ureueng gasien. Di rumoh nyan tinggai sidroe mak, sidroe ayah, sidroe aneuk agam. Awaknyan getthat gasien. Makjih meuping gang ngon tika. Kujih ngon guni. Seudang keu bu jipajöh boh peuték. "Hai gata jinoo geuyue jak le raja keudeh. Jiseuot awak nyan, "Han di lön, kadang geukeumeueung huköm. Ureueng nyan teupaksa keuh jak. Sabab peurintah raja.

'Oh trök u rumoh raja, aneuk raja pih seung'ab bak jimoe. Lheuh nyan geucok

keuluarga nyan geusantön lé raja. Aneuk nyan geuangkat keu aneuk angkat raja. Geuböh nan aneuk gasien nyan Raja Amat, seudang keu aneuk droegeuh geuböh nan Banta Amat. Hingga meungon keuh awaknyan dua.

Banta Amat hana jiteupue bahwa Raja Amat nyan kon syëdara droejih, meunan cit di Raja Amat. Jadi watëe ka rayék aneuk raja jameuen buh me'u en panta. Me'u en panta nyan ngon aneuk-aneuk Peudana Meuntroe ngon aneuk-aneuk panglima. Boh panta aneuk raja nyan intan. Watëe ka na umu lapan atawa sikureueng thon awaknya jimeu'en sumpit. Bak siuroe trok bak sibak bak kayëe, na saboh ticém ateu bak nyan. "Kheun Raja Amat bak Banta Amat, "Bëk kasumpit adoe ticém nyan, meuyoe kasumpit bahaya geuta nyoe".

Han jipatéh le Banta Amat. Meuji-sumpit teuk laju teungoh jimeudakwa-dakwa nyan, keunong ticém nyan. Rét keudëh u rumoh makmogh, inong nyan geumeukawën watëe lheuh lahe jih. Nan makmo nyan Putroe Laila. Ticém beuno di cök laju lé makmogh jigom di yub beulangong ateu para.

Raja Amat ngon Banta Amat seutot keuh laju keunan. watee trök keunan jitanyong, "Mak, na ret ticém kamoe keunoe", "Teuma geujaweub, "Hana neuk, paken han kaék keunoe". Lheuh nyan jikheun lom, "Cit keuno ret." Geujaweub lom, "Hana !". Muejiék teuk awaknyan u rumoh. Laepah putroe tamong u dalam, Banta Amat jiek ateu para, jicök ticém nyan. Lheuh nyan jitron. Watee jieue le makmogh, meujiteugom teuk, tapi hana

jiteumeueng. Awak nyan jigrôb laju u leun. Beukah bajêe Banta Amat bak rueng bak jiteugom lé makmojih.

'Oh lheuh nyan makmojih geupeurintah dayang geuyue ikat droegeuh bak teupat tôh-tôh 'iek lam keuadaan teu lhôn. Yah Banta Amat ka leupah jak meujeue, jak mita eungkôt. 'Oh geuwoe raja geuhoi, "Hai . . . hai buka pintô. Tacok eungkôt." Lhèe go geuhóí baro geuseuôt, "Nyo pat lôn." Pakon han kacok eungkôt, "Kheun raja. "Han jeut kubeudôh di lon," seudt putroe. Lheuh nyan geuék raja. "Ma nyoe so pute buet ?" tanyong raja. "Buet aneuk droeneueh Banta Amat ngon Raja Amat. Lheuh nyan kheun raja, "Hana layak jipeulayak, ék patot dijak ikat makjih. Hana layak jipeulayak gaki supak jiboh gaca. Hana patot jipeupatot gaki euntôt jiboh eunta". Tarék peudeueng raja jak seutot Banta Amat ngon raja Amat. Rupajih peristiwa nyan jipeugah lé Banta Amat jipeugah bak makdroejih. Di makjih geupeugah lom bak budak. Meujipeung'ui teuk awaknyan dua jeut lagèe awak inong. Watèe trok raja, kheun budak "Bék kawôk-kawôk hai raja, jéh pat meulintèe, tunagan Raja Amat ngon Banta Amat". Beudoh teuk raja jak teumeutuk keu tunangan aneuk bandua. "Meunyo meunan Daulat tunangan nyoe bandua kujak intat lé lôn. Man meunyo Tuanku peureulee keu darah keumeung jéb jeut lôn puwoe. Meunan cit meunyo peurelèe keu até awak nyan bandua." Sabab di raja nyan kalheuh geukheun-kheun, "Kupoh maté, kupajôh haté ku jéb darah.

'Oh leuhnyan budak beuno jijak laju intat tunangannya. Padahai bandua tunangannya nakeuh Banta Amat ngon Raja Amat nyang ka jipeung'ui lagèe inong.

Watèe trôk keudéh jipeugah keuh bak Raja Amat ngon Banta Amat, "Awaknyoe bandua jak laju beujiôh, meu untông-untông keuh dua awak nyoe".

'Oh watèe woe budak nyan jibloe teuk kameng dua boh. Kamèeng nyan jisie. Darah jibôh lam teumalang, jicok haté jipuwoe keu raja.

Lheuh jéb darah, lheuh pajôh kamèng nyan, raja gisa lom keudéh bak putro Laila.

Raja Amat ngon Banta Amat jak keuh laju, ék glé trôn gle hingga trôk teuk bak saboh teupat. Di sinan na sibak bak kayèe. Teungeut teuk Banta Amat lam leumueng bangjih. Teungoh teungeut, muekunong teuk geutah saboh ticém ateu bak kayèe nyan. Rupajih ngon theun geuthahnyan Teungku Syiah Rimba. Ka jitimoh bak seumali ateu ulee bak geutheun han jitem keunong. Bak uroe nyan kakeuh keunong. Ret ticém nyan u geunireng Raja Amat. Dicok laju jigeunton ngon teutojih. Prueh jibeudoh Banta Amat, "Pue rôl naknyoe Bang ? "Seuôt Bangjih, 'Hana sapue dék, éh laju !".

"Na Bang, cit ban ret naknyoe, su meuleubab". Teuma jijaweub Bangjih, "Na ticém", "O tasie Bang," Kheun adékjih. Tanyong Bangjih lom, "Ma pat tatôt?" Seuôt adékjih, "Talayu bak mata uroe mantong!" Bak meudakwa-dakwa ka talô Raja Amat. Sie teuk ticém nyan. Watèe karab pajôh ticem nyan trok teuk Teungku Syiah Rimba, "Ka bagi kah neuk, di lôn ka jitimoh bak seumali bak ulèe hana kuetumèe ticém nyoe. Man kunasehat bacut bak kah dua, "Soe ngon pajoh ulèe, di lèe jeut ke raja, soe nyan pajôh iku sêp jipeuduek bawah, dudoe-dudoe barô jeut keu raja". Lheuh jipeugahnyan Teungku nyan pih Gadoh.

'Oh ban ka masak mendakwa teuk awaknyan, "Nyoe soe pajôh ulèe? Seuôt adékjih, "Ai kon Bang pajôh ulée. "Bek dék, kah pajôh ulée ! kheun bangjih. Beudoh teuk Banta Amat jicok laju iku jipajôh keuh laju keu jih. Raja Amat pajôh keuh ulèe. 'Oh lheuh jipajôh meujiteuka teuk grah. Kheun Raja Amat, "Meunyo meunan bah kuék lôn ateu bak kayèe kukalon pat na ie". Jiék keuh laju. Trôk keunan deuh jieue mon na saboh. Kheun jih, "Di kah adék kapreh sinoe mantong !". Trôk keunan dicutiet si ðn-ðn empeuk jijéb ie keudre. Jicutiet siðn teuk jikeumeung puwoe ie keu Banta Amat. Gajah pih trok keunan. Jicok Raja Amat jipuduek laju ateu ruengjih, jiba keuh laju bak saboh nangroe.

Di Banta Amat, 'oh katréb ka jipreh, "Ho ka geujak Bang hana trôk geuwoe ?" Jiseutot teuk. 'Oh trôk keunan ngon na cit bakat gajah.

Di jih hana dituri gajah. "hana lé banglôn ka jimé lé bruek leusöng nyoe".

Di Raja Amat bunoe ateu rueng gajah priek bajèe tiek ateu ret keutanda keu adékjih, habéh bajè jipriek tangkulök, habéh nyan jipriek sileuweue. habéh nyan jipriek aröng peudeung, habéh nyan jitiek ngon peudeung. Nyan pih ka habéh jitiek keuh aneuk panta. 'Oh lheu nyan hana jiteupeu tik lé. Banta Amat sutot keuh laju, jiteumeung bajèe, jiteumeung peudeung, jiteumeung aneuk panta. panta. Watèe katroh u binéh gampong, uroe pih ka seupöt. Jéh beuno Raja Amat 'oh bantrök u gampöng nyan jeut laju keu raja. Sabab nanggroe nyan na kaöi. ureueng nyan jeut keu raja nakeueh Raja Gajah Ba.

Uroe ka seupöt Banta Amat trök bak gampöng nyan, jajak laju bak Meunasah. Éh di sinan. Ban ka mugrèb jibang teuk, "Allahuakbar," jideungo teuk lé Lahuda, "Jéh pat bék kawök-kawök, soe ka keubang di Meunasah." Lahuda nyan ureueng kaya, ureueng ngon mat keurajaan yöh masa galom na raja.

Watèe jikkeun soe keubang-keubang, bék kawök-kawök, seuöt Raja amat, "Pane na kubang-kubang, ngon kubang-kubang kon keubeue. "Pue keubeue-keubeue, di meunasah soe ?" tanyong Lahuda. "O, ureueng bang," Seuöt raja. Kheun Lahuda lom, "jak mè bu-bu sujuk " Jibeudoh peulayan rumoh nyan mèkeuh bu. "Assalamualaiköm !" "Alaiköm salam," seuöt Banta Amat. Kheun peulayan, "Nyo pat bu geuyue ba lé Lahuda. "Séb röh pakiban bu kateupue ba, lampu hana ka teupue ba", kheun Banta Amat. Jicok keuh aneuk panta jipuduek ateu teuöt. Aneuk panta nyan hu. Nyan keuh keu lampu pajoh bu. Peulayan beuno jipeugah bak Lahuda bahwa teungku nyang di meunasah nyan, "Hana kuteupue geupeudek ateu teuöt, hu keudéh", "Nyan keuh intan. Jinoe kajak tueng teungku nyan keunoe".

"Teungku-teungku geupeugah lé Lahuda geuyue woe u rumoh." Seuöt Banta Amat, "Hana pue singoh di lôn meukat meujak. 'Oh lheu meudakwa-dakwa lheu keu Banta Amat. 'Oh lheu nyan jiyue jak aneuk jih, jiyue jak kalon Banta Amat. Banta amat han cit ditémjak.

Kheun Lahuda, "Tayue aneuk buta siblah, tayue ngon buta dua blah. tajak keudroe barô keuh sah." Jajak keuh laju Lahuda. Trok keunan jikkeun, "Teungku, teungku keudéh u rumoh geuéh." Seuöt Banta Amat, "Dilôn bah di sinoe kuéh, singoh kumeungjak lom".

"Han jeut tengku, nanggroe nyoe hana aman, pancuri lé that. Jinoe di nanggroe nyoe hana raja, nyoe keuh lôn keu raja". Meudakwa-dakwa keuh awak nyan, lheu keu Lahuda, "Bé-bé na barang Teungku, jök keunoe bak lôn jeut kusimpan", bandum barang Banta Amat jicök lé Lahuda. 'Oh beungoh uroe ka poh siplöh Lahuda galom cit dibeudoh éh. Jiyue pugoe bak aneuk jih. Lahuda hana ditém jök barangnyan, Banta Amat jiyue ikat bak guha 'iek. Beungéh inong Lahuda diéu Banta Amat diikat lam guha 'iek. 'Oh ka beungéh inongjih, kheun Lahuda, "Cok bak guha nyan yue rabékamèng-kamèng keudéh.

Takeuh Banta Amat peulara-lara kamèng. Kamèng pih kalé jeut. jimé teuk lé Lahuda Banta Amat nyan ngon kapai jak maniaga bak saboh nanggroe. Trök keunan lahuda ék laju u istana raja. Banta Amat duek di yueb bak mamplam. "Soe jéh ?" tanyong raja. "Si cokèng, ma peu neubloe keu raja", jaweub Lahuda. Di kamoe kana budak, keucuali putroe tulét, kutanyong dilèe bakjih. Rupajih putroe tulét peureulèe keu budak. Bloe keuh si cokèng nyan (Banta Amat).

Banta Amat nyan uléh putroe tulét jiyue rabé-rabé kamèng cit, tapi jipeugèt teupat éh 'oh got bacut, bu pih got bacut. Tapi di Banta Amat meurasana hina droejih. Han tèm jiwoe u istana. Jipeugot teupat éh keudroe lam umpueng kamèng. Meunan cit meunyo na bu-bu krak nyan keuh jipajöh, sahingga beungèh putroe tulét. Pakon di Banta Amat nyoe dijak éh lam umpueng kamèng, padahai nyopat ka got tapeugot tempat éh keujih. Tanyong putroe, "Pakon dikah cokèng kajak éh lam umpueng kamèng, kapajöh bu krak padahai di lôn bukakuseudia, tempat éh kupeugot, sang-sang dieue lé gob lôn kusia-siakan sidroe budak. Banta Amat jiseung'ab, hana diseuöt sapue.

Cerita Rakyat

Kakeuh sahingga kamèng nyan jijôk dua boh lé putroe tulét kajeut meureutôh. Jadi ban seupôt Banta Amat dong bak pintô umpueng kamèng, jikheun bak kamèng, "Dong !" Kamèng nyan patuh that keu Banta Amat. Bak si uroe gadoh teuk kamèng dua boh. 'Oh singoh uroe jijak seutot, tôk bak rumoh gogasi. Tanyong gogasi, "Ho kajak Banta Amat ?". Jaweubjih, "Alah hai Mak di lôn kagadoh kamèng dua boh". "Kamèngkah karôh kucok lé lôn. meunyo meunan kubayeye ngon dua boh kamèng meuh, dan seumenjak uroe nyoe kah kucok keu aneuk lôn; keunoe kawoe bu, meunyo jeut di sinoe kaéh". Jiwoe keuh laju Banta Amat jipuwoe kamèng meuh.

Di yah Putroe tulét, raja di nanggroë nyan na tujôh droë aneuk. Gob nyan hana aneuk dilèe, geumeukaôdi teuk "Ya Allah Ya Tuhanku, meunyo êk na aneuk lôn tujôh droë, ban tujôh droë kujôk keu geureuda". Rupajih kaôdi nyan katrôk bak watèe. Hôdi teuk rakyat lam nanggroë. Kheun raja, "Soë ngon êk poh geureuda, putroe ban tujôh kujôk keu ureueng nyan, soë soë ngon poh geureuda beuna aneuk matajih dua neuk keu tandajih". Seut Lahuda, ureueng laen seung'ab bandum, "Ulôn keuh nyang poh geureuda nyan.

Bak si uroe kheun gogasi bak Banta amat, "Kalheuh ku lhôh lam dônya nyoe, hana laen ngon êk poh geureuda, nyan keuhkah ngon êk poh". Ka trôk bak watèe peuteubiet keuh putroe tuha keudéh u padang. Cangguek, tupè, ureueng lam nanggroë habéh plung bandum kateumakôt, jak meusom keudéh keunoe.

Lam mon bak bineh padang, Lahuda teudong 'oh got, peudeueng saboh, leumbéng saboh, tumbak saboh. Dari jidh deuh jieue léputroe aneuk raja paléng gagah, lengkap ngon guda prang. Jiplueng meuasab keunan bak putroe. Jisaleum keuh. Pakon tuan putroe sidroe sinoe bak teungoh padang ?" Seuôt putroe nyan, "Kamoe na kaôdi yah; ban lahé kamoe ban tujôh geujôk keu geureuda". "Pakon lagè nyan di ayah droneuh geukeumeueng jôk ban tujôh aneuk keu geureuda. Pue tinggai keu gobnyan ?" Jitanyong lom, "Soë ngon poh geureuda ?" Jaweub Putroe, "Jéh pat Lahuda lam mon," "Ai pakiban jipoh

geureuda dijih jéh pat lam mon. Jinoë na pue lôn tanyong, "Pue keu tanda bagi ureueng nyang poh geureuda ?." "Geupeugah lé ayah, aneuk mata geureuda dua neuk." "Meunyo meunan kajeut, jôktampôk ceumara keunoe bak lôn putroe jak woe laju."

'Oh lheu nyan trôn Banta amat uleun, tôt balè nyan meujibeudoh teuk asab. Meujithèe teuk lé geureuda. Jitrôn keuh laju keunan seupôt ngon nanggroë, h'ap... h'ap su sayeuep jih. Pruek jiteubet èk Lahuda lam mon ka teumakôt. Jitukik teuk geureuda jikeumemeueng poh Banta Amat. Meujigrôp teuk Banta amat u wateuh jitak geureuda bak takuejih. 'Oh lheu nyan jijak cunké ban dua neuk mata geureuda nyan jisôk bak awé. 'Oh lheu nyan teubit teuk Lahuda lam mon, di kalon mata geureuda ka hana lé, meujicok teuk lidahjih woe laju bak raja, "Bulat-bulat Daulat tuanku, kalheuh lôn poh geureuda nyopat lidah keu tanda. Bek sulét-sulét Daulat tuanku peukawén laju lôn ngon putroe." Seuôt raja, "Kajeut Lahuda, nyan kon barô saboh mantong nam boh teuk geureuda ngon harôh tapoh.

'Oh lheu nyan peuteubit putroe saboh teuk, lusa saboh teuk sampé putroe tulét. Di Banta Amat sabé jilakèe tanda bak putro. Putroe keu dua jilakeë subang, putroe keu lhèe gleueng, keu peuet seulop. Singkat habajih lakèe tanda bak putroe tulet.

Rupajih bak poh geureuda nyang teu akhéë, Banta Amat keunong sayeup geureuda. Trôk gogasi jijak puwoe u rumah peubat. Di Lahuda beuno teubiet keuh lammon, 'oh jikalon mata geureuda kahana lé, meujitak teuk pha droë jiwiet ngon tumbak, jiwoë laju u rumoh raja, "Bulat-bulat daulat Tuanku, nyoe ka keuneulheuh ci geukalon pha lôn ka jikap lé geureuda. Ma pajan geupeukawen lôn ngon putroe ?" Seuôt raja, "Preh keuh dilèe siat, nyan kon janji lôn ngon kah".

Peugot keuh persiapan di raja na lhèe buleuen. Peuék putroe ban tujôh u wateuh balèrung. Teungoh preh-preh trôk Teungku Kali trôh teuk Banta amat keunan. Banta Amat di êk laju keunan. Meujitanyong, "Pue ka ramè-ramè nyoe Daulat Tuanku ? "Seuôt raja," Kamoe

keumeung peukawén aneuk ngon Teungku Lahuda jéh". Na siat lheu nyan trôh Teungku Kali. Kheun Banta Amat, "Na pue meutanyong bak putroe. "Dijôk ngon aneuk mata geureuda bak putroe sarang jitanyong, "Nyoe seupo ceumara, seupo seulop", Seuôt putroe nyan, "Nyan atralôn. "Boh cok pulang". 'Oh lheu nyan beudoh teuk putroe ban tujôh jisipak teuk Lahuda nyan sigo sapo. Kakeuh hana jadéh peukawén putroe ngon Lahuda.

'Oh singoh uroe beudoh gogasi jak langké putroe tulét, mè ngon meuh. Peukawen keuh Banta Amat ngon putro tulet. 'Oh lheuhnyan jipakat teuk putro lé Banta amat jak woe u nanggroe jih jak saweue ma ngon kujih. Rupajih watèe beurangkat kapaijih dimeunumpang lé Lahuda. Banta Amat jitulak rôl lam laôt. 'Oh jikeumeueng tamong lam kama putroe meujigunci teuk kama, sahingga Lahuda han leupah jitamong. 'Oh kapai katrôk bak peulabôhan bagah-bagah jijak meulapur bak raja. Raja lam Nanggroe nyan Raja amat. Jipeugah teuk bak raja, "Di lôn na kupuwoe putroe, ma keumeung meukawén ngon putroe nyan".

Di Banta Amat lam laôt meuteumeung si ôn papeuen, jipôt-pôt trok keuh u bineh nanggroe nyan cit. Di meunumpang keuh bak rumoh Makni sidroe ureueng tuha, buet gobnyan karang-karang bungong keu putroe raja. Bak siuroe meujitanyong teuk lé Banta Amat, "Mak ho geujak mē bungong tiep-tiep uroe ?" Seuôt Makni. "Keu putroe, di sideh na putroe barô jipuwoe lé Lahuda".

"Oh watèe silap Makni meujikarang teuk bungong lé jih saboh. Jiteumpôk matong kajeut keu saboh keunarang bungong nyang ceudah that. Bungong nyan jitiék lam umpang ranup Makni nyan. Beudoh Makni jak mē bungong. Geucok eumpang ranup geutingkue laju 'Oh troh u rumoh raja meujilakèe teuk eumpang

ranup nyan lé putroe, jikeumeueng pajoh ranup. Watèe jikalôn na saboh bungong kalheuh meukarang jitanyong teuk, "Nyoe so karang lagak that hantem ngon ka-ka ?" Jaweub Makni "Sabab gata dua droe mangat adé kupasoe keuno saboh." Kheun putroe, "Kon, nyoe na ureueng laen nyang karang, keupeu geusom". "Pane ureueng laen, cit sidroe lôn dirumoh". Kheun Makni, "Dilôn kujak woe laju gotthat sakét pruet, padahai Makni kateumakôt. "Preh dilèe, kamoe meujak cit u rumoh dron," kheun putroe. "Alah hai putroe bek neujak u rumoh lôn. Beuklam dilôn saket pruet, kutôh èk ban saboh rumoh, jadi kurah èk dilèe. Makni nyan geuplueng laju geuwoe u rumoh. Trok u rumoh geu reubôh boh labu bagah-bagah, geuruet-ruet ban saboh rumoh ka lagè èk. Banta Amat geusom ateuh para. Hana paduep tréb lheu nyan putroe ban dua pih trôk keunan u rumoh Makni. Kheun Makni nyan, "Alah hai Tuan putroe, nyoe ek ban saboh rumoh".

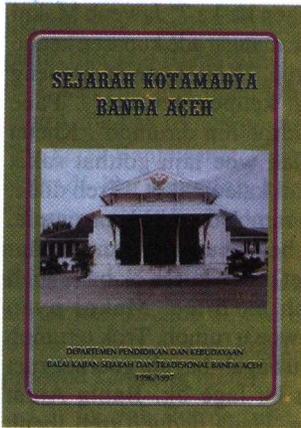
'Oh jikalôn lé putroe boh labu kajirô jiseupeuek-seupeuek ban saboh rumoh, jigidong laju lé putroe, jijak laju ban saboh rumoh. Dingieng keunoe-keudéh. Hana deueh sapue ngon na deueh cit beureukah ngom ateuh para. Meujipôt teuk angen jipeupo beureukah ngom. 'Oh watèe nyan leumah teuk Banta amat. Jitajô putroe jiteugom laju Banta amat. Kakeuh meurumpok awaknyan lom.

'Oh lheu nyan jak keuh laju jak meunghadap Raja Amat. Peugah-peugah keuh riwayat jameuen. 'Oh lheu nyan meujidrop teuk lahuda geuhukôm poh maté lé Raja Amat.

'Oh lheu nyan beudoh keuh awaknyan jak woe u gampông jak saweue ma ngon kujih. Ka keuh habéh haba. (*Disadur dari buku Ceritera rakyat, Mite dan Legende Daerah, Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, oleh Zaini Ali dkk, Proyek IDKD, Depdikbud, 1980-1981 oleh Sri Wahyuni, S.Sos)

Meungna *tuah* deungon untong, bijeh jagong pi jeuet keu boh
Meunghana *tuah* deungon untong, pade lam krong pi jeuet keu soh.

(Kalau ada tuah dengan untung, Bibit jagung menjadi buah
Kalau tak ada tuah dengan untung, padi di lumbung pun jadi kosong)



**BALAI KAJIAN SEJARAH DAN
NILAI TRADISIONAL BANDA ACEH**

Sejarah Kotamadya Banda Aceh 102 halaman, Rusdi Sufi (et al.)

Kota sebagai pusat pemukiman di mana terjadi berbagai kegiatan yang berupa pelayanan, kemudahan, perdagangan, pemerintahan, proses produksi dan sebagainya. Perkembangan kota itu sendiri sebagai akibat urbanisasi menjadi tema sejarah sosial. Sejarah pertumbuhan kota-kota di Indonesia telah banyak ditulis oleh sejarawan dan sosiolog, mengingat kota dengan kehidupannya yang kompleks sangat menarik dibahas.

Banda Aceh sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh dapat dipastikan sebagai tempat lahir dan berkembangnya masyarakat Aceh di dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam lintasan sejarahnya, Banda Aceh pernah menjadi kota maritim, perdagangan, tamaddun bahkan kota metropolitan pada masanya. Di balik kejayaannya yang pernah dialaminya, kota ini juga mengalami kemunduran demi kemunduran yang diakibatkan oleh imperialisme/kolonialisme dan pemberontakan-pemberontakan di daerah yang mengancam stabilitas nasional.

Sejarah Kotamadya Banda Aceh merupakan sebuah buku yang membahas secara kronologis sejarah Kotamadya Banda Aceh di dalam mengarungi kehidupannya. Dimulai dari masa Kesultanan sampai saat ini. Untuk lebih jelasnya, pembaca dapat membaca buku ini (ABW).

Pimpinan dan Karyawan/ti

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Telp. (0651) 23226 Fax. (0651) 24216

mengucapkan

*Selamat Atas Suksesnya Pelaksanaan
Sidang Umum MPR 1998*

Kepala

Drs. Rusdi Sufi

Pimpinan dan Karyawan/ti

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Telp. (0651) 23226 Fax. (0651) 24216

mengucapkan selamat atas terpilihnya

Bapak. H. Muhammad Soeharto

Sebagai Presiden RI

Bapak Prof. DR. Ing. B.J. Habibie

Sebagai Wakil Presiden RI

Masa Bakti 1998-2003 pada tanggal 11 Maret 1998

**Semoga Allah SWT memberkatinya dalam memimpin Bangsa dan Negara
Indonesia**

Kepala

Drs. Rusdi Sufi

